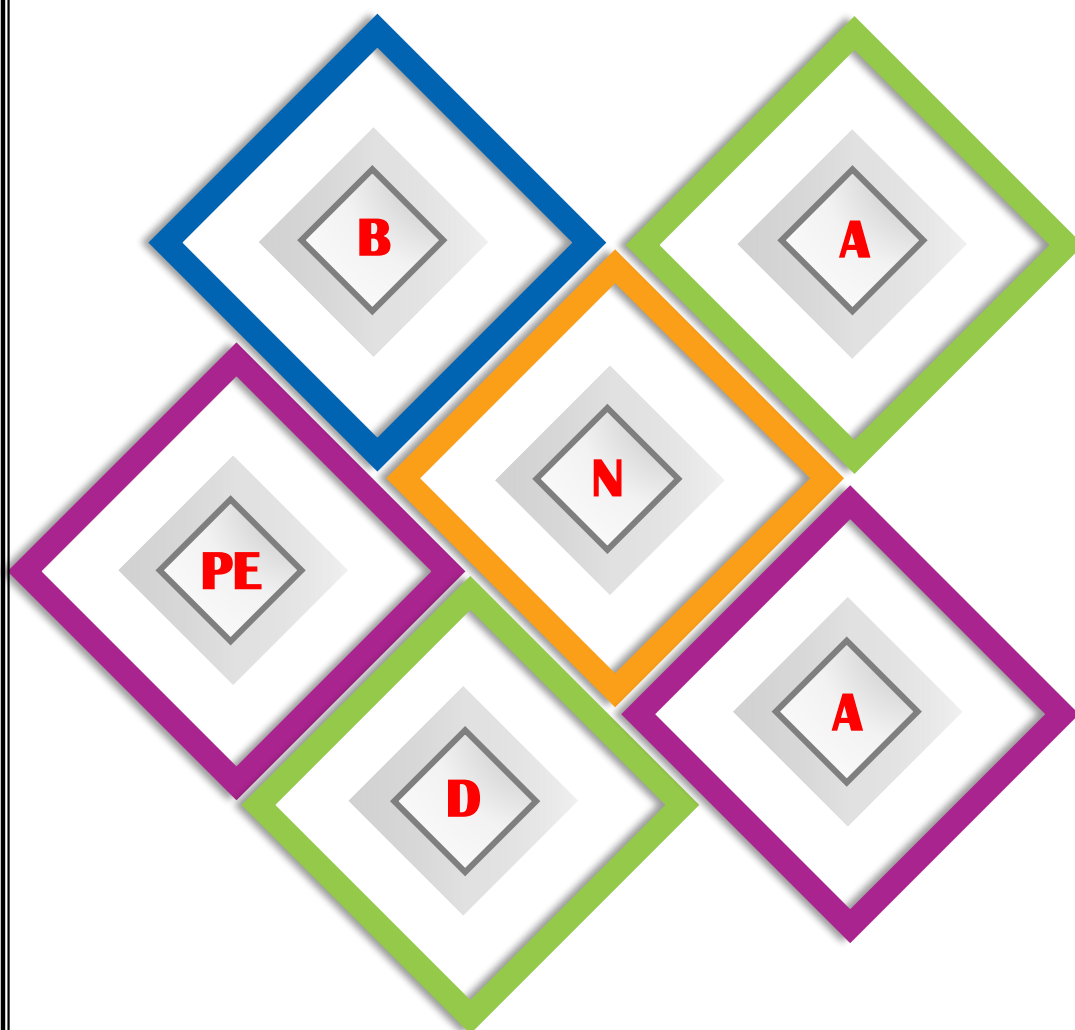




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**
TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I tahun 2026 yang menggambarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode jangka pendek Triwulan I tahun 2026. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisi dokumen analisis kinerja, mulai dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta implementasi kinerja yang tersusun secara sistematis.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai bentuk kinerja penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pendapatan. Serta implementasi tahun kedua penerapan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan pendapatan daerah dari penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, dengan sasaran strategis [1] Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal, [2] Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah, [3] Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dalam APBD, [4] Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, [5] Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, [6] Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan [7] Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap PDRB.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kinerja sektor pendapatan, agar kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan untuk pembiayaan pembangunan Sumatera Selatan tetap terjaga. Pentingnya menjaga ruang kapasitas fiskal daerah tetap tinggi untuk memastikan pelayanan publik ke masyarakat semakin baik.

Palembang, 10 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



D. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		I-1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja		I-7
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama (<i>Strategic issued</i>)		I-16
1.4 Landasan Hukum		I-22
1.5 Maksud dan Tujuan		I-24
1.6 Sistematika Penulisan		I-26
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 Telaah Visi dan Misi		II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD		II-5
2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja		II-14
2.4 Konsep Jejaring Kasalitas Pembangunan Kinerja		II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 Capaian Kinerja Organisasi		III-1
3.1.1. Capaian Indikator Tujuan		III-7
3.1.2. Sasaran Strategis 1 (SS.1)		III-11
3.1.3. Sasaran Strategis 2 (SS.2)		III-41
3.1.4. Sasaran Strategis 3 (SS3)		III-50
3.1.5. Sasaran Strategis 4 (SS4)		III-75
3.1.6. Sasaran Strategis 5 (SS5)		III-93
3.1.7. Sasaran Strategis 6 (SS6)		III-109
3.1.8. Sasaran Strategis 7 (SS7)		III-125
3.1.9. Sasaran Strategis 8 (SS8)		III-141
BAB IV PENUTUP		
4.1 Kesimpulan		IV-1
4.2 Langkah Strategis		IV-2

LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....

Lampiran II Grafik Kurva S Pemantauan Kinerja Realisasi Anggaran.....

Lampiran III Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan.....



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Formal 2026.....	I-10
Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bapenda Prov. Sumsel.....	II-6
Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pajak.....	II-7
Tabel 2.3 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pendapatan Lain Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat.....	II-8
Tabel 2.4 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengawasan dan Pembinaan.....	II-9
Tabel 2.5 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah.....	II-10
Tabel 2.6 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Sekretariat.....	II-11
Tabel 2.7 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi.....	II-12
Tabel 2.8 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II-13
Tabel 2.9 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Sumsel.....	II-15
Tabel 2.10 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pajak.....	II-16
Tabel 2.11 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pendapatan Lain Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat.....	II-16
Tabel 2.12 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengawasan dan Pembinaan.....	II-17
Tabel 2.13 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah	II-17
Tabel 2.14 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Sekretariat	II-18
Tabel 2.15 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi.....	II-18
Tabel 2.16 Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II-19
Tabel 2.17 Indikator Index Level Data	II-22
Tabel 2.18 Hasil Pengujian Unit Root	II-29
Tabel 2.19 Hasil Pengujian Lag Optimum	II-31

Tabel 2.20	Hasil Uji Kointegrasi Johansen.....	II-31
Tabel 2.21	Hasil Pengujian Test Terhadap Model Vektor Koreksi Kesalahan (VECM).....	II-32
Tabel 2.22	Hasil Estimasi Model VEC.....	II-33
Tabel 2.23	Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSSO Level 1 Terhadap IKSS.....	II-36
Tabel 2.24	Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1.....	II-36
Tabel 2.25	Persentase Cross Cutting IKSSO Level 1 Terhadap IKSS	II-37
Tabel 2.26	Persentase Cross Cutting IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1.....	II-37
Tabel 3.1	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026.....	III-3
Tabel 3.2	Pengukuran Data Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Tahun 2026.....	III-7
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Indeks Kapsitas Fiskal Sumsel Dengan Tahun Sebelumnya.....	III-8
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel.....	III-10
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indeks Kapsitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional.....	III-11
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi.....	III-13
Tabel 3.7	Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja.....	III-16
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran.....	III-17
Tabel 3.9	Perbandingan Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan.....	III-18
Tabel 3.10	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja.....	III-20
Tabel 3.11	Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	III-23
Tabel 3.12	Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1.....	III-27
Tabel 3.13	Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-29
Tabel 3.14	Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1 Terhadap Target Realisasi	III-29
Tabel 3.15	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi.....	III-33

Tabel 3.16	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung.....	III-36
Tabel 3.17	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran.....	III-37
Tabel 3.18	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan.....	III-38
Tabel 3.19	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja	III-39
Tabel 3.20	Pengukuran Realisasi Data Kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2026.....	III-43
Tabel 3.21	Pengukuran Realisasi IKSS 2 Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	III-45
Tabel 3.22	Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Tahun 2026 dan Target RPJMD.....	III-47
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2026	III-47
Tabel 3.24	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi	III-49
Tabel 3.25	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung	III-52
Tabel 3.26	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran.....	III-54
Tabel 3.27	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan.....	III-55
Tabel 3.28	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2.....	III-57
Tabel 3.29	Perhitungan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2026.....	III-60
Tabel 3.30	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 3 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-62
Tabel 3.31	Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 3 Terhadap Target RPJMD.....	III-63
Tabel 3.32	Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD	III-64
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2026 Terhadap Standar Nasional	III-64
Tabel 3.34	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Tahun 2026	III-66

Tabel 3.35	Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Tahun 2026	III-70
Tabel 3.36	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Tujuan dan sasaran	III-71
Tabel 3.37	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program Kegiatan	III-72
Tabel 3.38	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Tahun 2026	III-74
Tabel 3.39	Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara Target dan Realisasi IKSS 4 Tahun 2026	III-77
Tabel 3.40	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	III-78
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD	III-81
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2026 dengan Standar nasional	III-82
Tabel 3.43	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4	III-84
Tabel 3.44	Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4	III-87
Tabel 3.45	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Tujuan dan sasaran	III-88
Tabel 3.46	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Program Kegiatan	III-89
Tabel 3.47	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2026	III-90
Tabel 3.48	Pengukuran Data Kinerja IKSS 5 Tahun 2026	III-94
Tabel 3.49	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	III-95
Tabel 3.50	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD	III-97
Tabel 3.51	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Target RPJMD	III-98
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Standar nasional	III-98
Tabel 3.53	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 5	III-100
Tabel 3.54	Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5	III-104

Tabel 3.55	Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Tujuan dan sasaran.....	III-105
Tabel 3.56	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Program Kegiatan.....	III-106
Tabel 3.57	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6 Tahun 2026.....	III-108
Tabel 3.58	Pengukuran Data Kinerja IKSS 6 Tahun 2026.....	III-111
Tabel 3.59	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-113
Tabel 3.60	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD	III-114
Tabel 3.61	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Target RPJMD.....	III-115
Tabel 3.62	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Standar nasional	III-115
Tabel 3.63	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 6	III-116
Tabel 3.64	Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6.....	III-118
Tabel 3.65	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran.....	III-120
Tabel 3.66	Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan.....	III-121
Tabel 3.67	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 6.....	III-126
Tabel 3.68	Pengukuran Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2026.....	III-128
Tabel 3.69	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-129
Tabel 3.70	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Target RPJMD.....	III-130
Tabel 3.71	Capaian Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Target RPJMD.....	III-130
Tabel 3.72	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Standar nasional.....	III-130
Tabel 3.73	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 7.....	III-132
Tabel 3.74	Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7.....	III-135

Tabel 3.75	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan Sasaran.....	III-136
Tabel 3.76	Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan.....	III-137
Tabel 3.77	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6 Tahun 2026.....	III-139
Tabel 3.78	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.....	III-142
Tabel 3.79	Pengukuran Data Kinerja IKSS 8 Tahun 2026.....	III-144
Tabel 3.80	Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun 2026 dengan Target RPJMD.....	III-145
Tabel 3.81	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2026 dengan Target RPJMD.....	III-146
Tabel 3.82	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2026 dengan Standar Nasional.....	III-146
Tabel 3.83	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 8.....	III-147
Tabel 3.84	Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8.....	III-149
Tabel 3.85	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan sasaran.....	III-150
Tabel 3.86	Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan.....	III-153
Tabel 3.87	Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan dan Kegagalan Solusi IKSS 8.....	III-153

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	I-6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi dan Tata Laksana	I-9
Gambar 1.3	Hubungan Fungsi SOTK Dengan Kinerja	I-12
Gambar 2.1	Pilar Kinerja Bapenda.....	II-4
Gambar 2.2	Konsep Jejaring Kausalitas Pembangunan Kinerja	II-20
Gambar 2.3	Teknik Analisis Data.....	II-21
Gambar 2.4	Metodologi <i>vector error correction model (VECM)</i>	II-24
Gambar 2.5	Tampilan Awal eviews versi 13.....	II-28
Gambar 2.6	Tampilan Running Data.....	II-28
Gambar 2.7	Distribusi Variabel.....	II-31
Gambar 2.8	Distribusi Variabel Polinomial.....	II-32
Gambar 2.9	Dekomposisi Variabel.....	II-35
Gambar 2.10	Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN).....	II-40
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	III-10
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	III-12
Gambar 3.3	Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD 2025.....	III-28
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-30
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional.....	III-31
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Tahun Sebelumnya	III-46
Gambar 3.7	Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional.....	III-48
Gambar 3.8	Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan dengan Tahun Sebelumnya	III-63
Gambar 3.9	Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap	

	PDRB dengan Tahun Sebelumnya	III-80
Gambar 3.10	Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan Tahun Sebelumnya	III-97
Gambar 3.11	Grafik Perbandingan Kinerja Pencapaian PAD Tahun 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya	III-114
Gambar 3.12	Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya	III-129
Gambar 3.13	Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya	III-145

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2026
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2025
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja IKSS 1 Tahun 2026
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja IKSS 1 Tahun 2025
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja IKSS 2 Tahun 2026
Lampiran 6	Pengukuran Kinerja IKSS 2 Tahun 2025
Lampiran 7	Pengukuran Kinerja IKSS 3 Tahun 2026
Lampiran 8	Pengukuran Kinerja IKSS 3 Tahun 2025
Lampiran 9	Pengukuran Kinerja IKSS 4 Tahun 2026
Lampiran 10	Pengukuran Kinerja IKSS 4 Tahun 2025
Lampiran 11	Pengukuran Kinerja IKSS 5 Tahun 2026
Lampiran 12	Pengukuran Kinerja IKSS 5 Tahun 2025
Lampiran 13	Pengukuran Kinerja IKSS 6 Tahun 2026
Lampiran 14	Pengukuran Kinerja IKSS 6 Tahun 2025
Lampiran 15	Pengukuran Kinerja IKSS 7 Tahun 2026
Lampiran 16	Pengukuran Kinerja IKSS 7 Tahun 2025
Lampiran 17	Pengukuran Kinerja IKSS 8 Tahun 2026
Lampiran 18	Pengukuran Kinerja IKSS 8 Tahun 2025
Lampiran 19	Grafik Kurva “S” Rencana Dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 20	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Selatan



1.1. Latar Belakang

Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yang merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045, dimana pada tahapan pertama RPJMD tahun 2025 – 2045 menjalankan Visi Sumatera Selatan yaitu **Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua**.

Visi Sumatera Selatan tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Untuk mendukung visi dan misi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah membantu Gubernur dan Wakil Gubernur pada urusan keuangan sub urusan pendapatan, melaksanakan penjenjangan kinerja (*cascading*) atas Misi Keenam RPJMD tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas, dimana tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau dari sisi pendapatan daerah yaitu bagaimana kapasitas fiskal daerah yang semakin meningkat.

Penjabaran Misi Keenam RPJMD tahun 2025 – 2029 ini dituangkan ke dalam tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yaitu **Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan dengan penjenjangan kinerja (*cascading*) sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 (SS.1) Meningkatkan Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal dengan indikator kinerja sasaran strategis 1 (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*revenue mobilization*);
2. Sasaran Strategis 2 (SS.2) Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikator kinerja sasaran strategis 2 (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah;
3. Sasaran Strategis 3 (SS.3) Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dalam APBD dengan indikator kinerja sasaran strategis 3 (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dalam APBD;
4. Sasaran Strategis 4 (SS.4) Meningkatkan Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dengan indikator kinerja sasaran strategis 4 (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
5. Sasaran Strategis 5 (SS.5) Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja sasaran strategis 5 (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;

6. Sasaran Strategis 6 (SS.6) Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja sasaran strategis 6 (IKSS.6) Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Sasaran Strategis 7 (SS.7) Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap PDRB dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. IKSS.7 Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas
 - b. IKSS.8 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I tahun 2026 merupakan periode kedua pelaporan kinerja jangka menengah pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029, yang memuat mengenai capaian kinerja, hambatan dan solusi dalam mencapai kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dokumen LKjIP yang disusun secara berjenjang antar unit eselon yang mendukung kinerja Eselon II dan/atau tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama pelaksanaan Triwulan I tahun 2026.

Tujuan dan sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan memperhatikan permasalahan (*strategic issue*) dan capaian pendapatan daerah serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta dinamika perkembangan perekonomian baik dalam skala regional maupun nasional

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Sebagai perangkat daerah di bidang pemungutan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Strategik Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

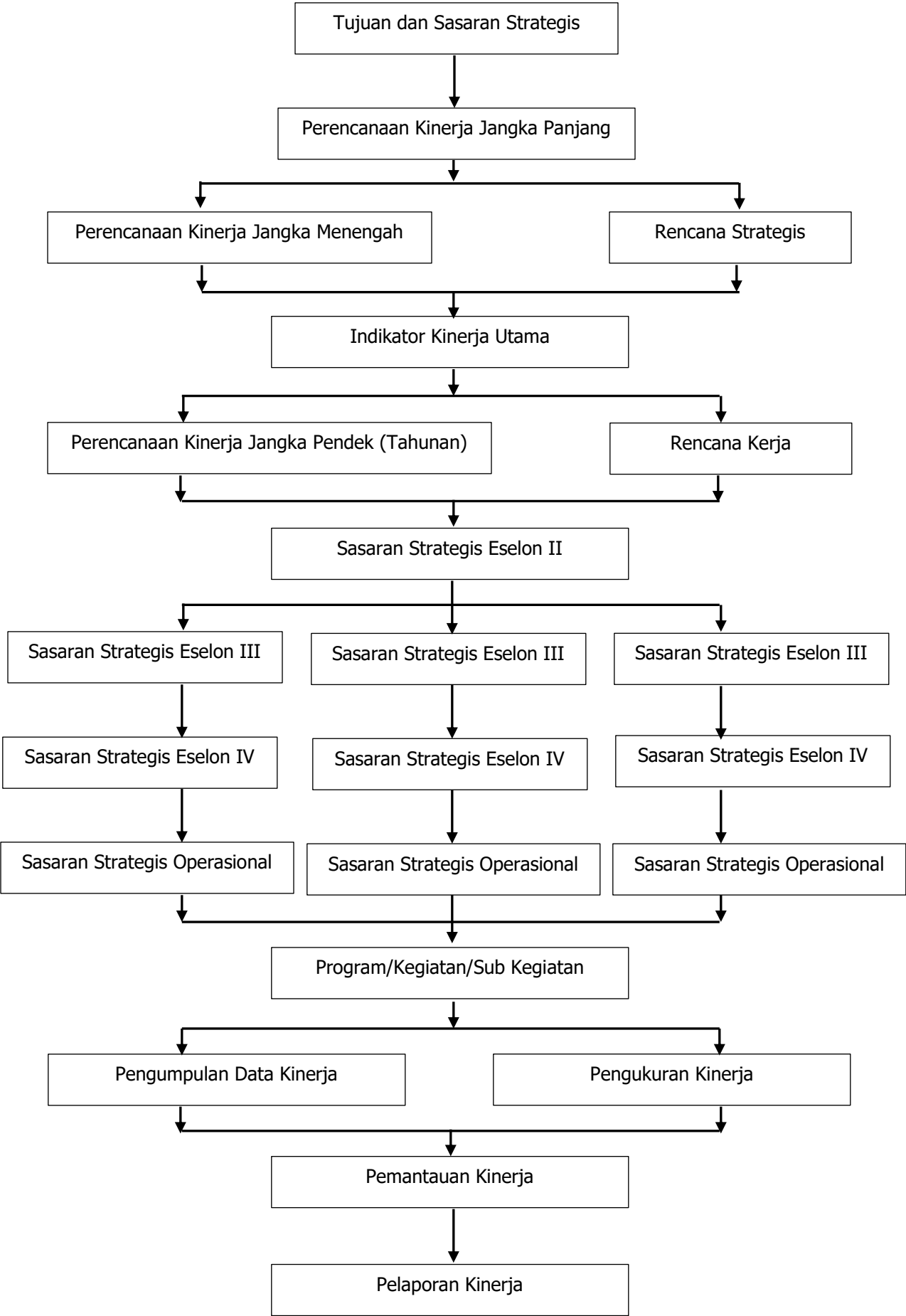
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kondisi realisasi kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka pendek. Dokumen ini menyediakan dasar bagi *core business* organisasi secara *sustainable* untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran

berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam upaya menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di bidang Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan.

Sehingga secara sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan terarah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu penyelenggara pemerinatahan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan. Adapun bagan alir proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar pada bagan alir berikut ini:



Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi

Secara rinci tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

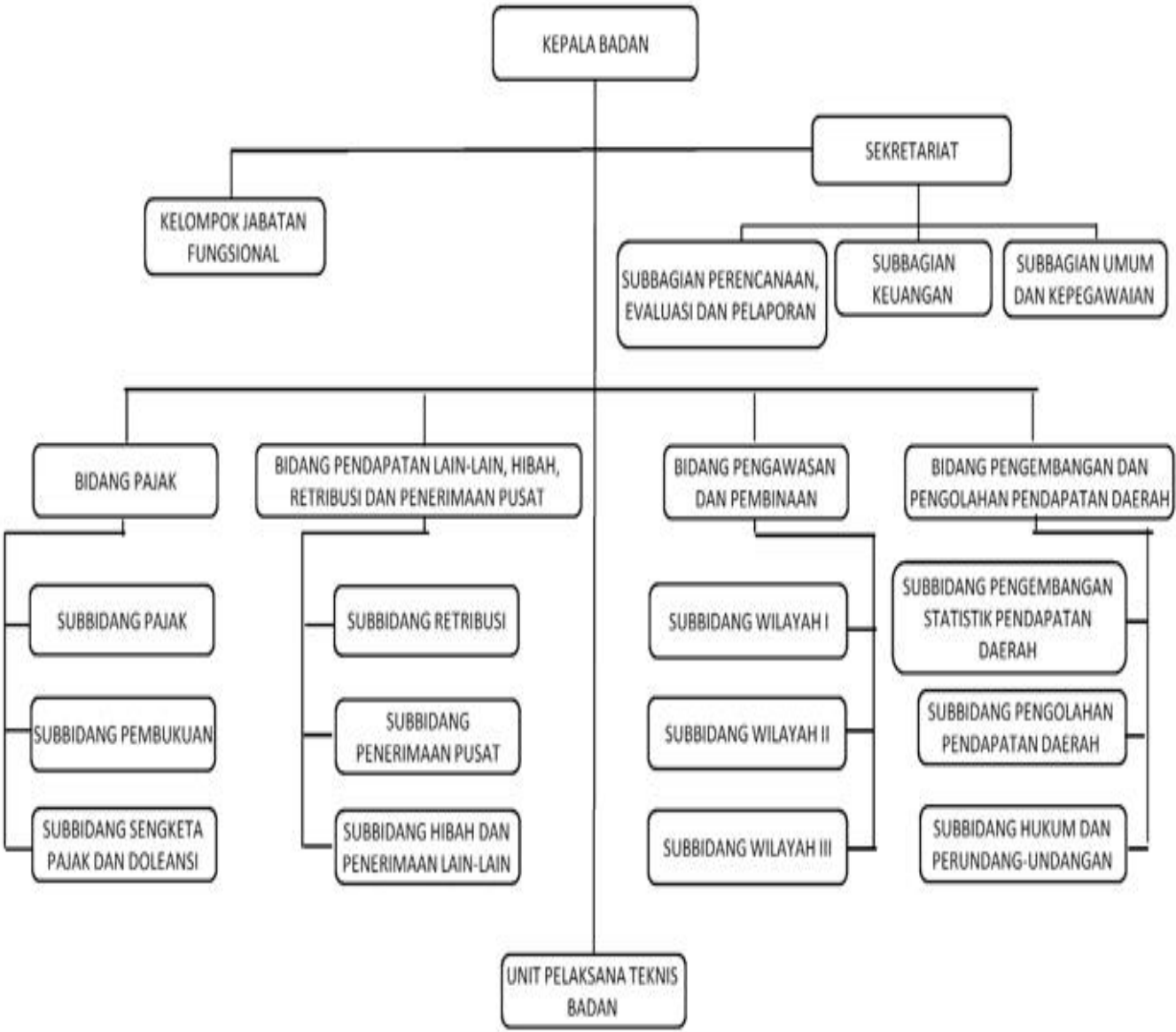
3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 dimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disusun sebagai berikut:

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak
 - Subbidang Pembukuan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi
- Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat membawahi:
 - Subbidang Retribusi
 - Subbidang Penerimaan Pusat
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I
 - Subbidang Wilayah II
 - Subbidang Wilayah III
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - Subbidang Hukum dan Perundang-undangan
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Gambar 1.2
Struktur Organisasi dan Tata Laksana
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Sumber Daya Manusia

Kondisi eksisting struktur sumber daya manusia (SDM) atau indeks modal manusia (IMM) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai motor penggerak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah berjumlah 420 (empat ratus dua puluh) orang pegawai, terdiri dari 121 (seratus dua puluh satu) orang Golongan IV, 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang Golongan III dan 20 (dua puluh) orang Golongan II.

Struktur dan jumlah sumber daya manusia (SDM) tergambar pada Tabel I.1 berikut

Tabel 1.1
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2026

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SLTP/ Sederajat	-	-	-
2.	SLTA/ Sederajat	19	7	26
3.	Sarjana Muda/ Sederajat	13	9	22
4.	Sarjana S1	98	54	152
5.	Pasca Sarjana	108	110	218
6.	Doktoral	2	-	2
Jumlah		240	180	420

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Kondisi Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 16 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru yang resmi beroperasi pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas diisi pada seluruh UPTB dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalokasikan pembangunan 2 unit kantor UPTB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan akan dianggarkan seterusnya secara bertahap untuk kedepannya.

Samsat Keliling merupakan pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak.

Samsat Drive Thru merupakan pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini sudah beroperasi 3 (tiga) samsat Drive Thru dan kedepan akan diperluas secara bertahap.

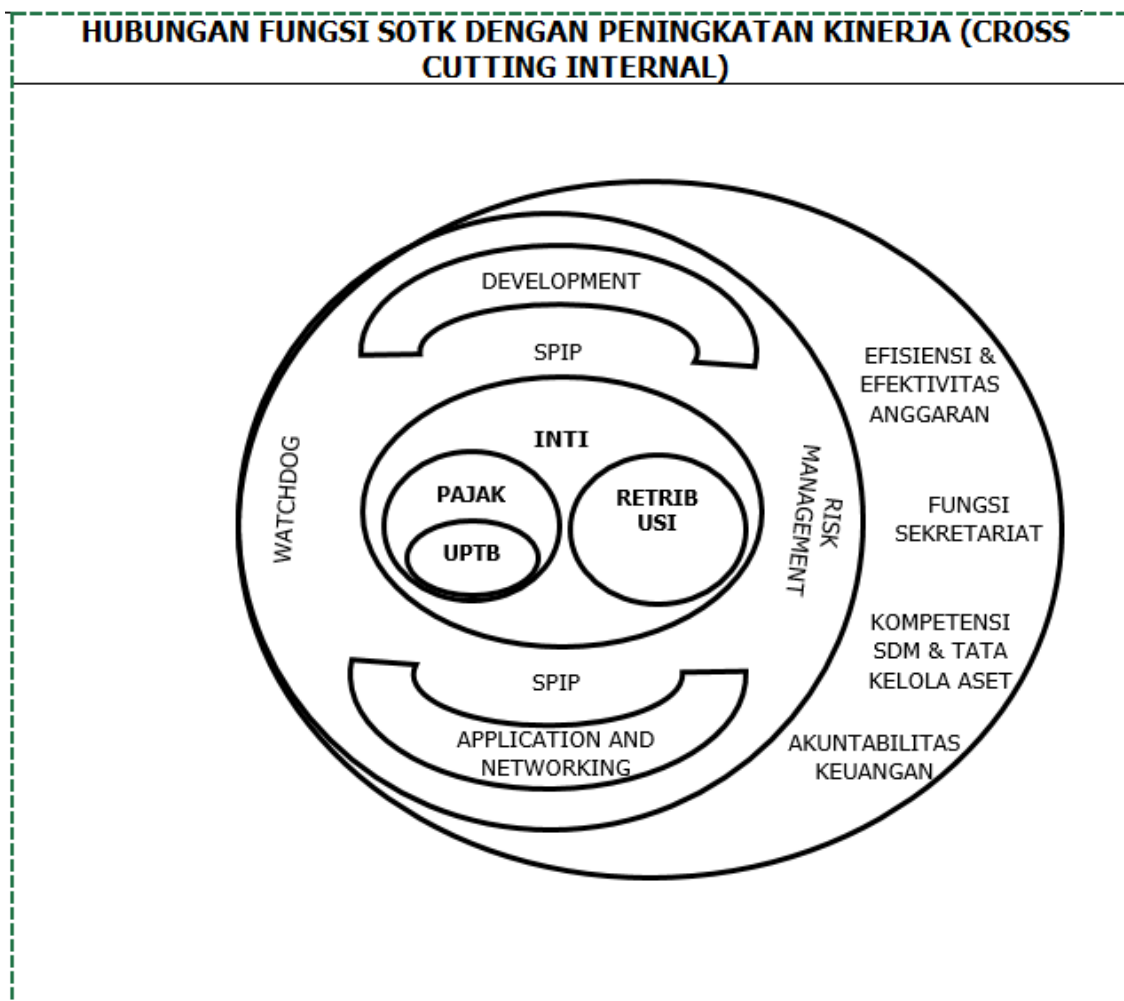
Samsat Mall merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu: PTC Mall, PIM, PS Mall dan di Lubuklinggau.

Samsat Corner merupakan salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan.

Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

Tata Kerja

Yang dimaksud tata kerja dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah terciptanya hubungan kerja yang kolaboratif antar unit kerja (*internal cross cutting*) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Hubungan tata kerja yang kolaboratif tersebut digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1.3
 Hubungan Fungsi SOTK Dengan Kinerja
 Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Hubungan tata kerja (*internal cross cutting*) sebagai berikut :

1. Bidang Pajak – Bidang P2PATDA Kolaborasi

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pajak, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam pajak daerah, sementara Bidang Pajak membuat kebijakan di sektor pajak antara lain insentif fiskal daerah, kebijakan equivalen dan opsen PKB serta opsen BBN-KB

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pendapatan Lain Lain, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam retribusi daerah, sementara Bidang Retribusi membuat kebijakan di sektor retribusi antara lain kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

2. Bidang Pajak – Bidang Wasbin Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pengawasan, pengendalian intern, pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah sehingga mengurangi risiko atas kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Bidang Pajak – UPTB Puslia Kolaborasi

UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi (Puslia) menjalankan kebijakan di sektor pajak daerah (Bidang Pajak) dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pajak, antara lain Sistem Pembayaran Pajak melalui e Dempo, SOS, e signal, SIAPO, e PAP, e PAB, Sistem Pembayaran Pajak melalui e commerce (Tokopedia, Bli Bli.com, Indomaret dan Alfamart).

4. Bidang Wasbin – UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara intensif atau secara berkala kepada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penetapan pajak daerah.

5. Dan lain lain Bentuk Kolaborasi Antar Unit Kerja

Sekretariat sebagai koordinator, melakukan internal cross cutting terhadap semua Bidang/UPTB untuk pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan anggaran serta kebutuhan sumber daya lainnya dalam meningkatkan kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Hubungan tata kerja (*eksternal cross cutting*) sebagai berikut:

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal register nomor kendaraan bermotor.

B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk kegiatan memberikan *pelayanan di samsat*.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.

D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasi di Sumatera Selatan dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.

E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber – sumber retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi BUMD Provinsi Sumatera Selatan.

G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun Lalu

Aspek tindaklanjut rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun lalu yang merupakan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu:

1. Telah mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja;
2. Telah membuat rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah;
3. Telah melaksanakan pengukuran hasil capaian kinerja masing-masing pegawai agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
4. Telah melakukan telaaha pengukuran kinerja agar mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
5. Telah melaksanakan pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja;
6. Telah membuat jadwal pembahasan laporan kinerja sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana kerja masing-masing indikator kinerja;

7. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Aspek strategis keberadaan organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara mobilisasi pendapatan (*revenue mobilization*) daerah merupakan salah satu strategi yang mencerminkan kemandirian otonomi daerah dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah

Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sementara permasalahan-permasalahan (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2025, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 89,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 10,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

- 1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.
- 1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.
- 1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan

gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.

1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.

1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan

Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.

1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.

1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan

dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

- 1.j Jangkauan pemberian pelayanan kepada wajib pajak masih belum optimal.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan dinamika keberadaan wajib pajak yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sumatera Selatan, termasuk wilayah *captive area* menjadikan tantangan tersendiri dalam mengejar target pendapatan daerah dari sisi pajak daerah. Pembentukan unit layanan saat ini sudah 29 unit layanan yang tersebar dalam wilayah 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan dirasakan belum juga optimal dikarenakan berada di pusat kota, sementara jangkauan layanan wajib pajak menyentuh wilayah perairan pedalaman Sumatera Selatan.

- 1.k Belum optimalnya digitalisasi pembayaran pajak daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan elektronifikasi pemerintah daerah antara lain digitalisasi pembayaran pajak daerah belum memadai. 7 (tujuh) kanalisasi dalam pembayaran non tunai yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat segera terpenuhi pada pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Permasalahan Eksternal

- 2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- 2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2025, sudah 10 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target (>100%) dan 3 Perangkat Daerah lainnya belum

mencapai target (<100%). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 8.283.459.488,00 (110,67%) dari target sebesar Rp. 7.484.658.673,00.

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

2.f Operasional alat angkutan berat atau kendaraan barang banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Perlu adanya pengaturan operasional angkutan barang dari sisi hulunya, sehingga kendaraan angkutan barang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan ikut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.g Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB

Pada tanggal 05 Januari 2025 mulai dilaksanakannya opsen PKB dan Opsen BBN-KB, dimana penerimaan bagi hasil dari pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota dilaksanakan secara real time split payment ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota sebesar 66 persen dari hutang Pokok PKB dan BBN-KB.

2.h Kondisi Geopolitik Internasional

Geopolitik internasional antara Amerika Serikat – Iran yang dapat mempengaruhi perekonomian global, terutama pada perdagangan internasional yang mempengaruhi ekspor – impor energi. Konsumsi energi yang masih bergantung pada bahan bakar minyak berbahan bakar fosil yang mempengaruhi harga minyak mentah di pasar global. Kondisi ini menciptakan kebijakan efisiensi konsumsi energi secara di dalam negeri yang berdampak pada penghematan bahan bakar minyak sehingga dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I tahun 2026 merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan *good government* karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Sebagai monitoring dan evaluasi secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah terhadap target yang telah ditetapkan dalam *cascading* dokumen Renstra tahun 2025-2029;
3. Sebagai *early warning*, atas hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya;
4. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
5. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Uraian maksud diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan serta sub kegiatan sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada Triwulan I tahun 2026.

Sementara tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu penyusunan LKjIP juga mengacu dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan akhir dari capaian kinerja dan langkah strategis perbaikan kinerja pada periode tahun berikutnya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Grafik Kurva S Pemantauan Kinerja Realisasi Anggaran
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan



2.1 Telaah Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Arah Pembangunan tahap pertama dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai fokus pembangunan maka arah pembangunan tahap I melingkupi beberapa poin sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan
2. Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
4. Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.

5. Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
6. Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
7. Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.
8. Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
9. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
10. Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
11. Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
14. Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional.
15. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
16. Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
17. Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
18. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 2 (dua) "Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan

yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”. Selanjutnya misi ke 2 (dua) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Membuat regulasi daerah tentang tata niaga dalam rangka proteksi sektor pertanian.
3. Mendorong percepatan reforma agrarian tingkat daerah.
4. Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan fungsi koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD, BUMDes dan swasta melalui program kemitraan.
5. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.
6. Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.
7. Mengendalikan inflasi dengan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Cabang Sumatera Selatan.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa antar daerah.
9. Mendukung program restorasi lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
10. Mendukung upaya menjaga ekosistem laut, daerah pesisir dan hutan mangrove.
11. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Melanjutkan revitalisasi pasar-pasar tradisional.
13. Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
14. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Berdasarkan penelaahan visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 diatas, maka pilar pembangunan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dari sisi Pendapatan Daerah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Pilar Kinerja Bapenda

“.....Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kualitas Pembangunan Sumatera Selatan yang adil merata.....”

Nilai nilai dalam pilar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kapasitas Fiskal Daerah yang terus meningkat dan berkembang, menunjukan bahwa daerah kinerja sisi pendapatan daerah harus optimal dengan potensi kemampuan daerah yang ada;
2. Ruang konsolidasi dan harmonisasi fiskal Pusat dan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berbasis inovasi, keunggulan dan daya saing, mengurangi ketergantungan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menciptakan investasi, penguatan basis pajak daerah;
3. Implementasi dan menciptakan impact Indikator Kinerja Utama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Dimensi Pembangunan Kinerja:
 - a. *Customer Perspektif*, dengan melaksanakan:
 - ❖ Penguatan Basis Pajak Daerah,
 - ❖ Sinergi dan Kolaborasi
 - ❖ Kepatuhan Wajib Pajak
 - ❖ Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pembayaran

- b. *Internal Process*, dengan melaksanakan:

- ❖ Program Prioritas Daerah
 - ❖ Peningkatan nilai outcomes kegiatan sub kegiatan
 - ❖ Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
 - ❖ Analisis deviasi keterlambatan pelaksanaan
- c. *Learning and Growth*, dengan melaksanakan:
- ❖ Pengawasan secara intensif berbasis skala risiko dan skala dampak
 - ❖ Menggali potensi PAD berbasis kemampuan daerah
 - ❖ Kelembagaan organisasi yang kuat
 - ❖ Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah atau Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bapenda Prov. Sumsel

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon II						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	2,28
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	%	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	8,51
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	0,520
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	%	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	1,48
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,25	1,252	1,256	1,258	1,260	1,270	1,270
5.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	55,64
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	NA

2. Bidang Pajak

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Pajak						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	%	1,61	1,73	1,81	1,84	1,93	1,96	1,96
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,53	14,81	14,91	15,02	15,19	15,28	15,28
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,19	5,02	4,93	4,88	4,71	4,62	4,62
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pendapatan
Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang PDLL						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	%	95,12	95,43	95,67	95,84	95,93	96,00	96,00
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,45	89,78	89,85	89,91	89,97	90,08	90,08
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,71	83,93	84,06	84,17	84,27	84,39	84,39
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,42	84,83	84,94	85,02	85,13	85,27	85,27

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Tabel 2.4
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengawasan
dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Wasbin						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,64	92,91	93,06	93,21	93,34	93,61	93,61
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,03	16,85	16,71	16,53	16,29	16,19	16,19
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,88	12,74	12,59	12,51	12,38	12,29	12,29

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Tabel 2.5
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bidang Pengembangan
dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang P2PATDA						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,89	82,19	82,31	82,44	82,69	82,89	82,89
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,69	83,81	83,96	84,06	84,16	84,32	84,32
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,41	93,62	93,74	93,88	93,97	94,15	94,15
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

6. Sekretariat

Tabel 2.6
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Sekretariat						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,83	94,96	95,01	95,17	95,28	95,43	95,43
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	5,02	4,92	4,72	4,61	4,43	4,28	4,28
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,78	80,92	81,14	81,32	81,63	81,92	81,92

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

Tabel 2.7
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pusat Informasi
dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB Puslia						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,34	62,67	62,71	62,84	62,93	63,06	63,06
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,32	91,54	91,70	91,82	91,94	92,14	92,14
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,93	79,21	79,38	79,52	79,73	79,81	79,81
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,46	41,78	41,86	42,03	42,26	42,48	42,48
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.8
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah UPTB Pengelolaan
Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB PPD						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,87	8,62	8,41	8,33	8,24	8,12	8,12
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,72	9,60	9,58	9,41	9,32	9,21	9,21

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja diperoleh melalui hasil analisa *cascading* atau penjenjangan pohon kinerja yang dimulai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah”.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian

tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran strategis pendapatan dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2025 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian /kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Bapenda yang telah disusun baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2026 akan menjelaskan rumusan hasil indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Sumsel Tahun 2026

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
	Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	IKU	2,02
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	IKU	6,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	IKU	0,458
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKU	1,28
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKU	1,252
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKU	49,89

6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,21
7.	Meningkatnya Kontribusi Terhadap PDRB PAD	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,98
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,18

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

Tabel 2.10
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,73 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,81 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Tabel 2.11
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pendapatan Lain Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,43 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,78 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,93 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,83 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Tabel 2.12
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengawasan dan
Pembinaan Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,91 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	16,85 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,74 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Tabel 2.13
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Bidang Pengembangan dan
Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	82,19 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,81 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,62 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

Tabel 2.14
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,96 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	4,92 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,92 %

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

Tabel 2.15
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi		Indikator Kinerja Outcomes	62,67 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama		Indikator Kinerja Outcomes	91,54 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi		Indikator Kinerja Outcomes	79,21 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi		Indikator Kinerja Outcomes	41,78 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs		Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

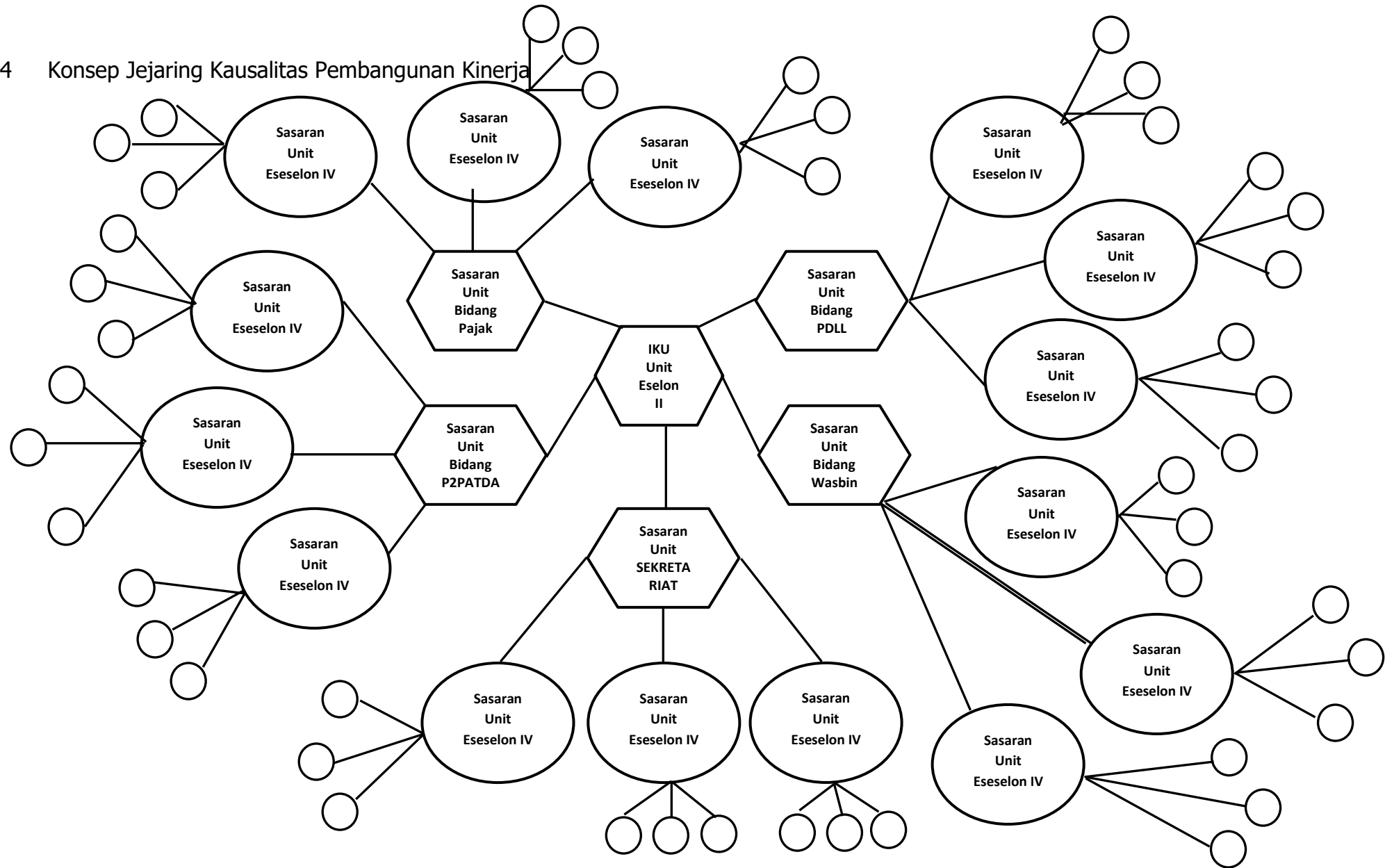
g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.16
Rumusan Hasil Perjanjian Kinerja UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,62 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,60 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

2.4 Konsep Jejaring Kausalitas Pembangunan Kinerja

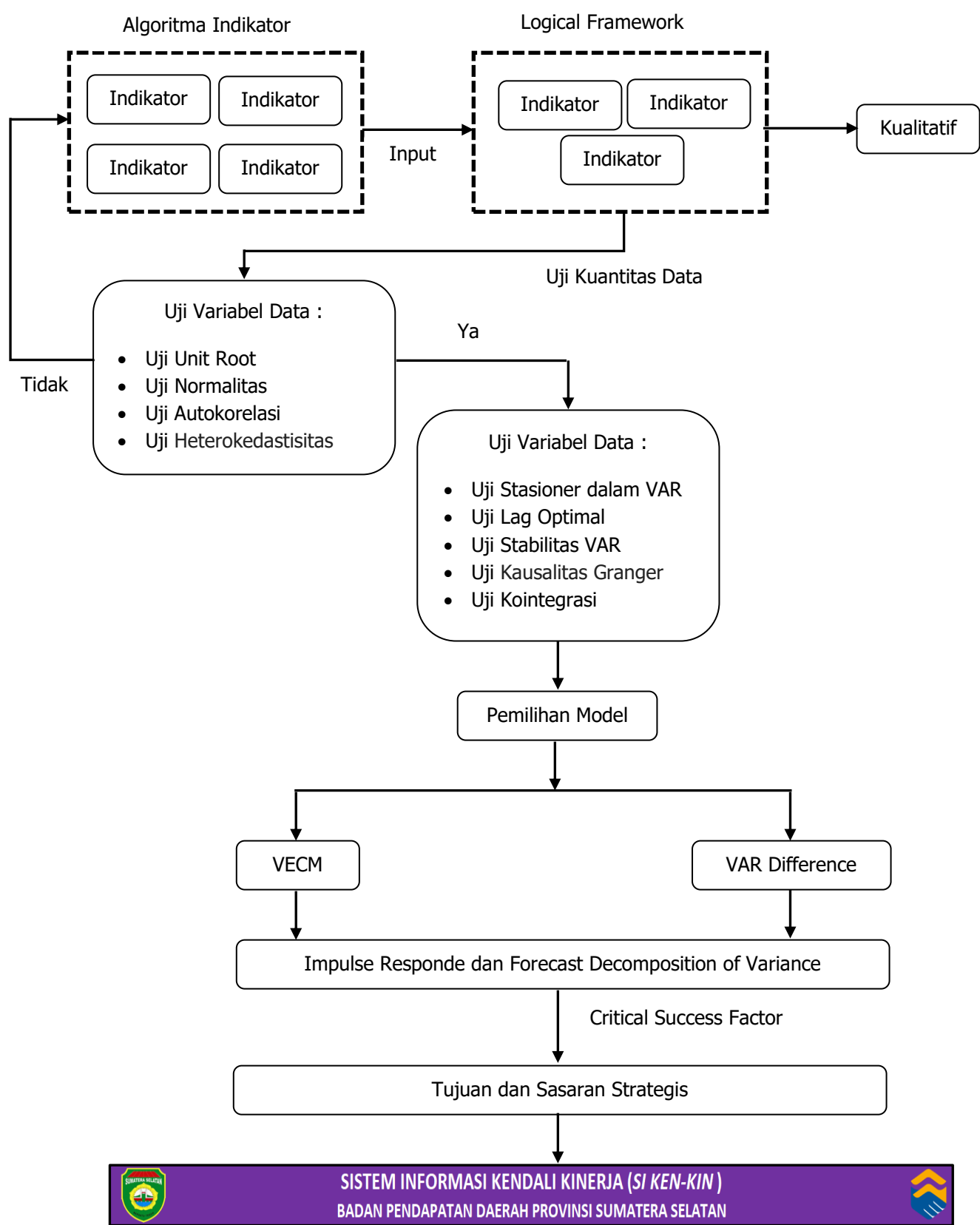


Gambar 2.2
Sumber : Bapenda Sumsel 2026

3 Teknik Analisa Data Indikator

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software evIEWS versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

- 1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Gambar 2.3 Teknik Analisis Data
Sumber : Bapenda Sumsel (Software EvIEWS 13)

Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

Tabel 2.17
Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Sasaran Strategis 1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Sasaran Strategis 2	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS3	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Sasaran Strategis 3	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Sasaran Strategis 4	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS6	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sasaran Strategis 6	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS7	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 7	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSS8	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 8	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi

IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

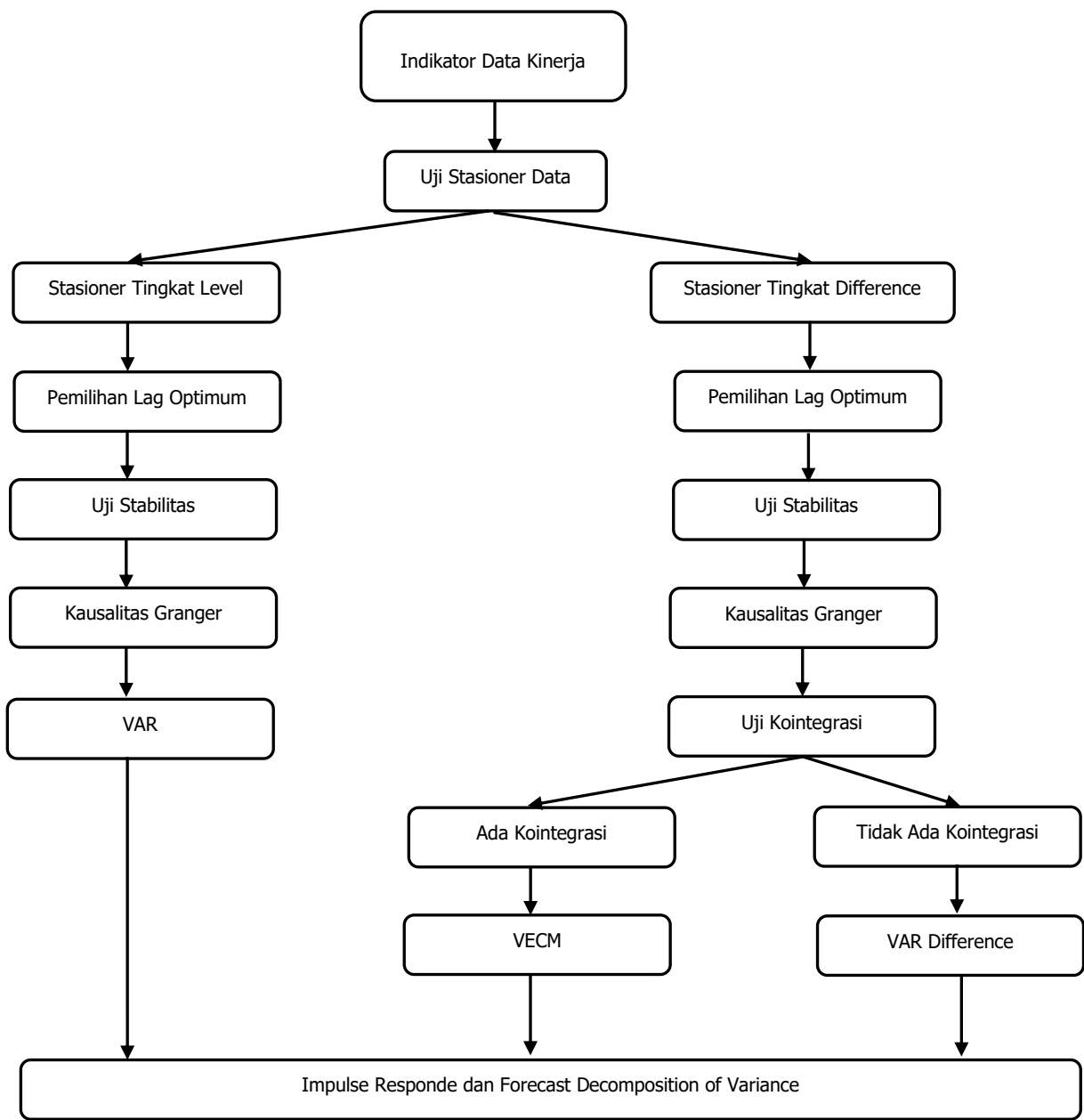
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software evIEWS versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Metodologi *vector error correction model (VECM)*
Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software EvIEWS 13)

Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model (VECM)* yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.

- b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
- c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS),

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter p , identik dalam deret waktu (yaitu, p , p untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $p = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $p < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi p_i menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $p_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $p < 0$, ($t=1, \dots, t$); $p = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural ($\ln$).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana: x , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut:

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

Dimana t adalah periode waktu ($t = 1, \dots, t$); l lag dari setiap variabel data; InIKSS adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; InIKSSO adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan IKSSO Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara IKSS dan IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya Y, 0 (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} =$

Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.18
Hasil Pengujian Unit Root

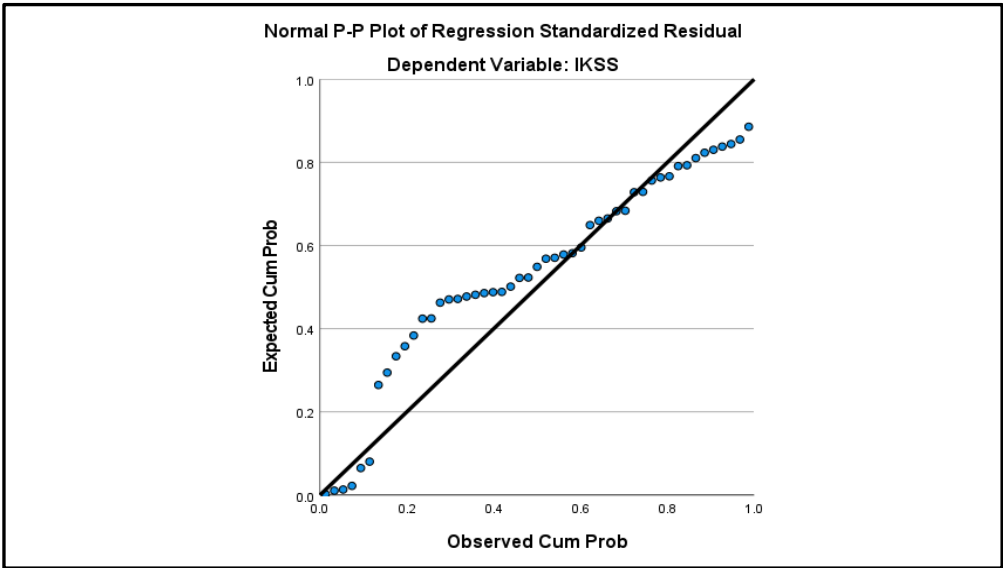
Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnIKSS7)$	-7.081123	-3.451682	-3.724587	-2.261899	0.0001
$\Delta (lnIKSS8)$	-7.050415	-3.620184	-2.076314	-2.810604	0.0018
$\Delta (lnIKSS01)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta (lnIKSS02)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta (lnIKSS03)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta (lnIKSS04)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnIKSS05)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnIKSS06)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnIKSS07)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnIKSS08)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnIKSS09)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnIKSS010)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnIKSS011)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnIKSS012)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS013)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnIKSS014)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnIKSS015)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnIKSS016)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS017)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnIKSS018)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnIKSS019)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnIKSS020)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnIKSS021)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta (lnIKSS022)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042

$\Delta (lnIKSS023)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (lnIKSS024)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (lnIKSS025)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (lnIKSS026)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (lnIKSS027)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

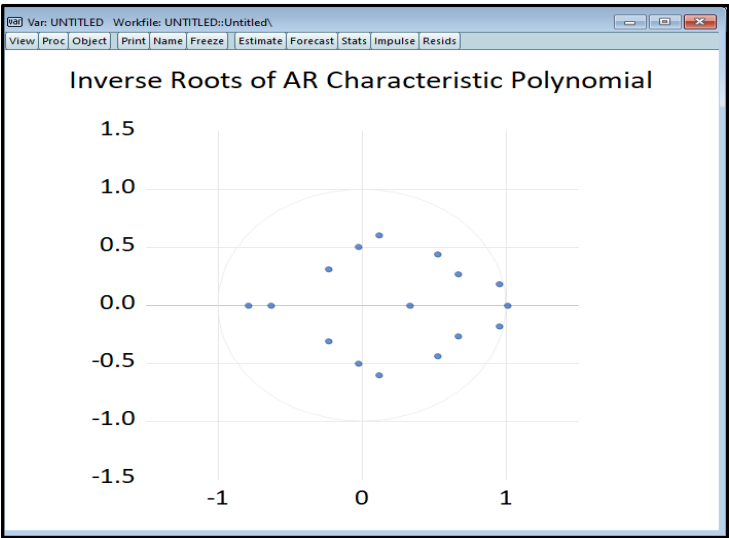
Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS)$; $\Delta(lnIKSSO\ Level\ 1)$; $\Delta(lnIKSSO\ Level\ 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Gambar 2.7
Distribusi Variabel

Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Gambar 2.8
Distribusi Variabel Polinomial

Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 35 (tiga puluh lima) variabel data yang diuji.

Tabel 2.19
Hasil Pengujian Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Tabel 2.20
Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Optimum Lag	$\Delta (lnIKSS)$	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	Joint
$\Delta Lag\ one$	2.561499 [0.7672]***	4.752189 [0.4469]**	1.749800 [0.8826]	14.90229 [0.0108]***	2.404408 [0.7908]	26.20479 [0.3967]
$\Delta Lag\ two$	4.661034 [0.4586]	1.807226 [0.8751]	3.341873 [0.6474]**	2.993611 [0.7010]	114.9873 [0.0000]***	157.2580 [0.0000]
Df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
Significant level ***1%, **5% and *10%
Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Tabel 2.21
Hasil Pengujian Test Terhadap Model Vektor Koreksi Kesalahan (VECM)

Trace Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036
Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513

At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036
------------	----------	----------	----------	--------

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software Eviews 13)

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS,2) &= 0.357687854138 \cdot D(lnIKSS(-1),2) + 0.255696325482 \cdot D(lnIKSS01(-1),2) \\
 &+ 0.363554788223 \cdot D(lnIKSS02(-1),2) + 0.222569874236 \cdot D(lnIKSS03(-1),2) \\
 &+ 0.555889632566 \cdot D(lnIKSS04(-1),2) + 0.666889566336 \cdot D(lnIKSS05(-1),2) \\
 &+ 0.110225577956 \cdot D(lnIKSS06(-1),2) + 0.330000561142 \\
 &\cdot D(lnIKSS07(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS01,2) &= 1.6134766894 \cdot D(lnIKSS08(-1),2) + 0.618968722732 \cdot D(lnIKSS09(-2),2) \\
 &+ 0.185263624107 \\
 &\cdot D(lnIKSS010(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS02,2) &= 0.61326312845 \cdot D(lnIKSS011(-1),2) + 0.340396781481 \cdot D(lnIKSS012(-2),2) \\
 &+ 0.116692533601 \\
 &\cdot D(lnIKSS013(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS03,2) &= 1.07193559441 \cdot D(lnIKSS014(-1),2) + 0.5599794065846 \\
 &\cdot D(lnIKSS015(-2),2) + 0.500636698415 \\
 &\cdot D(lnIKSS016(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS04,2) &= 0.420313895269 \cdot D(lnIKSS017(-1),2) + 0.200233652213 \\
 &\cdot D(lnIKSS018(-1),2) + 0.339965221000 \\
 &\cdot D(lnIKSS019(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS05,2) &= 0.604814176085 \cdot D(lnIKSS020(-1),2) + 0.66800500123622 \\
 &\cdot D(lnIKSS021(-1),2) + 0.558999622300 \\
 &\cdot D(lnIKSS022(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

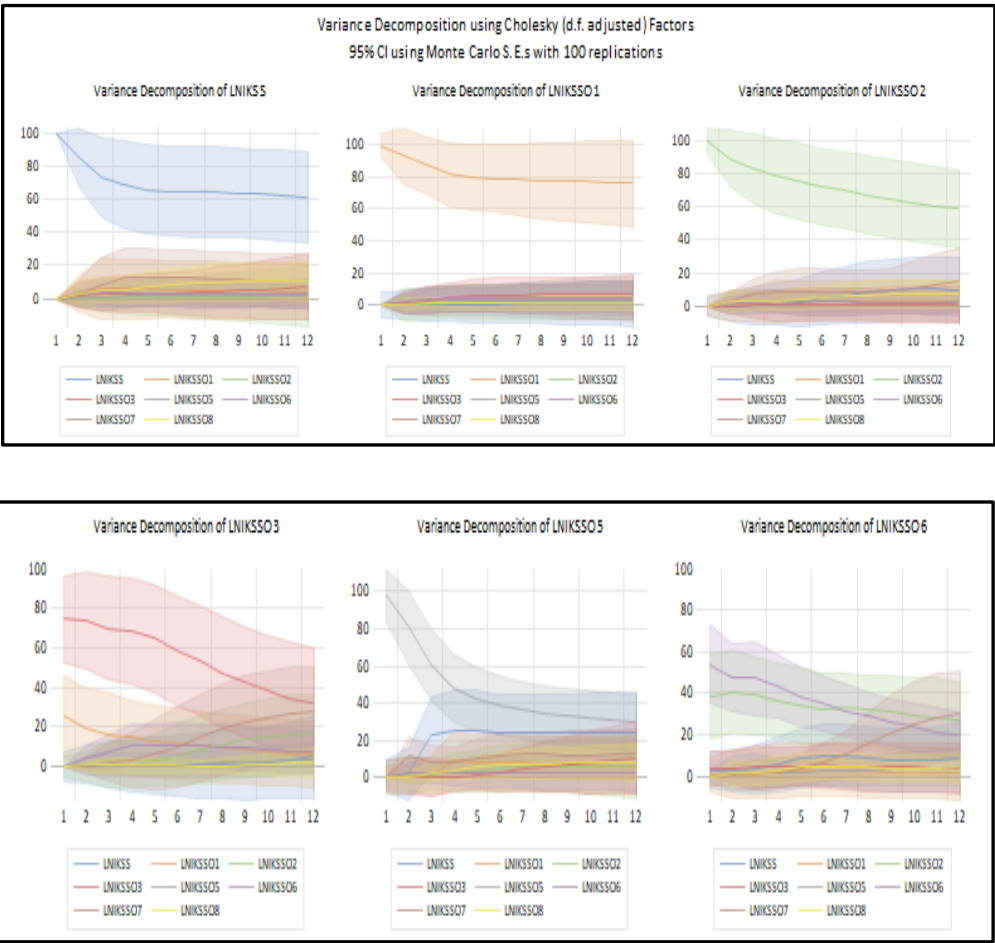
$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS06,2) &= 0.460615311019 \cdot D(lnIKSS023(-1),2) + 0.004125563678 \\
 &\cdot D(lnIKSS024(-1),2) + 0.445012300622 \\
 &\cdot D(lnIKSS025(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

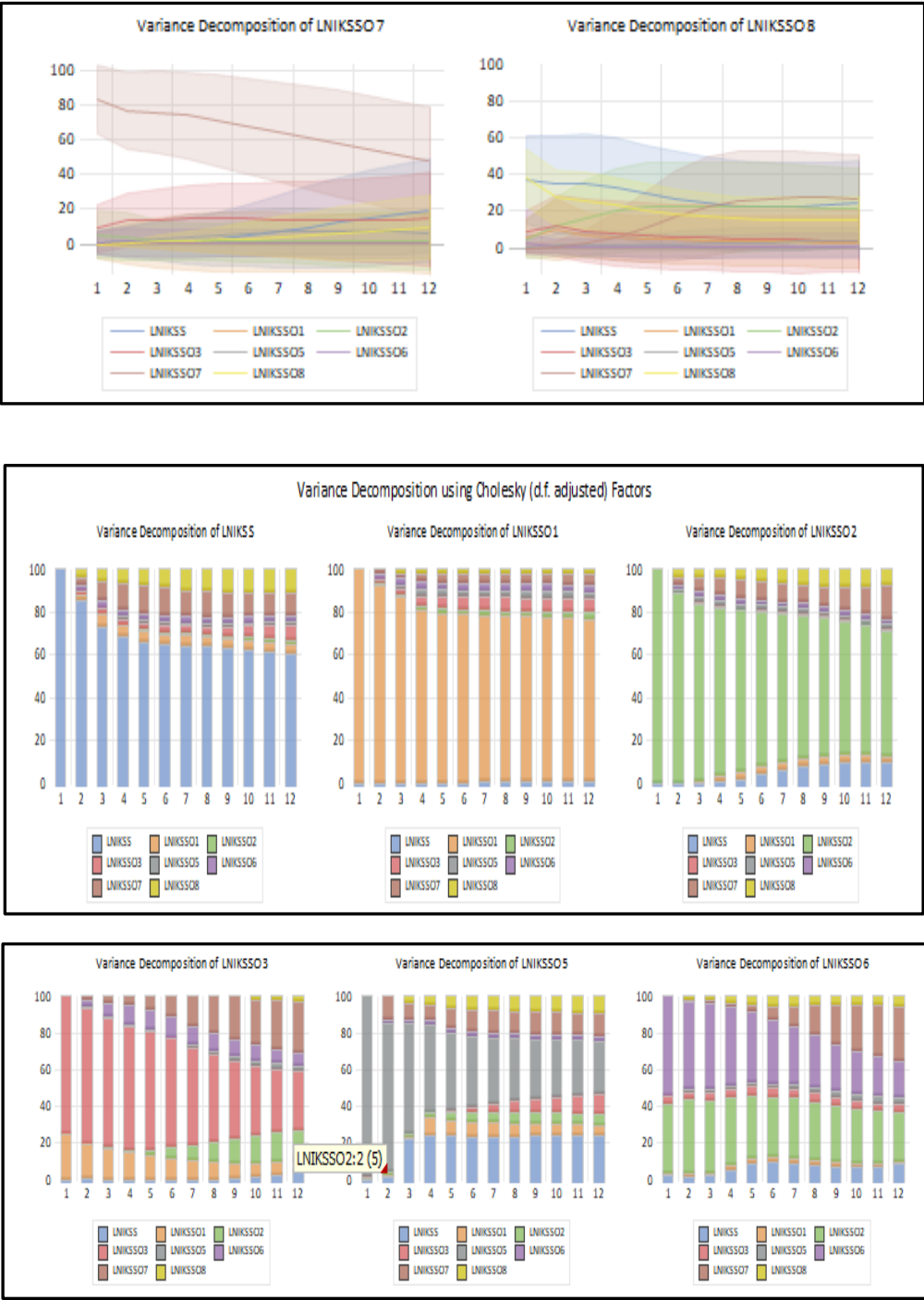
$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS07,2) &= 0.00731308357823 \cdot D(lnIKSS027(-1),2) + 0.008852003166 \\
 &\cdot D(lnIKSS027(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22
Hasil Estimasi Model VEC

Dependent Variabel	C	$\Delta (lnIKSS1_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS2_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS3_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS4_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (lnIKSS01)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R ² : 0.8557 Adj. R ² : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (lnIKSS02)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R ² : 0.8663 Adj. R ² : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (lnIKSS03)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R ² : 0.9063 Adj. R ² : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (lnIKSS04)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R ² : 0.8264 Adj. R ² : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (lnIKSS05)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R ² : 0.9380 Adj. R ² : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291





Gambar 2.9
Dekomposisi Variabel

6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukan hasil sebagai berikut:

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.23
Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	05.57	09.23	04.21	11.26	08.25	06.33
$\Delta (lnIKSS02)$	09.78	08.33	03.33	06.30	13.65	12.56
$\Delta (lnIKSS03)$	07.26	02.63	10.64	16.26	09.63	04.13
$\Delta (lnIKSS04)$	17.56	08.02	11.71	02.64	01.24	03.36
$\Delta (lnIKSS05)$	06.98	11.81	14.16	08.80	13.80	04.54
$\Delta (lnIKSS06)$	12.40	03.92	08.25	01.52	09.66	12.46
$\Delta (lnIKSS07)$	16.00	12.20	08.32	05.85	02.55	09.12

Sumber :Bapenda Prov. Sumsel (Software EvIEWS 13)

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.24
Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	06.39	05.16	03.13	07.23	08.89	05.63	01.25
$\Delta (lnIKSS09)$	11.34	07.72	04.17	04.21	04.23	04.58	02.15
$\Delta (lnIKSS010)$	07.76	04.45	06.09	06.61	05.18	03.69	09.34
$\Delta (lnIKSS011)$	02.15	05.19	10.23	07.17	04.14	06.66	03.34
$\Delta (lnIKSS012)$	06.14	05.89	07.53	04.56	02.30	08.11	04.41
$\Delta (lnIKSS013)$	05.13	08.52	06.86	05.05	06.12	09.10	06.61
$\Delta (lnIKSS014)$	05.16	02.12	08.85	07.16	07.78	13.39	14.51
$\Delta (lnIKSS015)$	08.26	04.56	01.23	02.67	07.19	06.25	07.32
$\Delta (lnIKSS016)$	03.33	12.25	02.23	07.19	07.61	04.48	01.24
$\Delta (lnIKSS017)$	00.13	03.66	06.71	01.36	10.83	09.83	04.45
$\Delta (lnIKSS018)$	02.48	01.59	05.82	08.30	10.11	03.43	05.52
$\Delta (lnIKSS019)$	09.56	08.13	06.19	07.35	07.77	05.51	06.63
$\Delta (lnIKSS020)$	08.25	08.12	05.26	01.46	01.32	08.56	07.73
$\Delta (lnIKSS021)$	04.84	02.36	09.13	03.66	08.79	01.25	05.26
$\Delta (lnIKSS022)$	06.63	09.23	00.45	07.55	05.38	06.99	07.78
$\Delta (lnIKSS023)$	07.21	02.00	02.33	04.41	05.63	03.24	04.20
$\Delta (lnIKSS024)$	04.32	01.63	04.12	05.56	04.48	04.99	09.65
$\Delta (lnIKSS025)$	04.15	07.14	05.63	05.67	03.34	04.77	08.78
$\Delta (lnIKSS026)$	08.22	06.67	04.41	07.72	01.23	05.55	01.79
$\Delta (lnIKSS027)$	01.26	04.34	05.57	06.62	04.41	09.62	02.60



b. Persentase *Cross Cutting*
(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.25 Persentase Cross Cutting IKSSO Level 1 Terhadap IKSS						
	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	10.43	09.77	15.79	18.74	12.75	13.67
$\Delta (lnIKSS02)$	10.22	13.27	12.67	13.70	16.85	17.44
$\Delta (lnIKSS03)$	12.17	17.87	10.36	13.14	19.37	15.87
$\Delta (lnIKSS04)$	12.44	19.71	18.29	17.16	13.16	16.64
$\Delta (lnIKSS05)$	13.02	16.19	15.64	11.20	16.20	15.46
$\Delta (lnIKSS06)$	17.26	15.08	13.75	18.48	19.34	13.54
$\Delta (lnIKSS07)$	14.00	15.80	12.68	13.15	17.15	19.88

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 13 (2026)

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.26 Persentase Cross Cutting IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1							
	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	13.71	10.81	12.11	12.57	11.23	17.83	18.75
$\Delta (lnIKSS09)$	18.16	12.32	13.43	15.17	12.12	13.44	17.85
$\Delta (lnIKSS10)$	12.24	11.12	12.48	13.40	10.92	15.01	19.66
$\Delta (lnIKSS11)$	13.04	14.81	12.34	13.24	11.34	15.06	12.36
$\Delta (lnIKSS12)$	14.05	14.23	12.83	12.67	12.45	13.40	16.26
$\Delta (lnIKSS13)$	14.56	11.48	11.10	11.72	12.46	15.63	15.33
$\Delta (lnIKSS14)$	14.84	17.88	11.15	10.84	12.22	16.61	15.49
$\Delta (lnIKSS15)$	19.74	15.44	13.77	11.33	12.81	13.75	12.68
$\Delta (lnIKSS16)$	16.67	13.75	17.77	12.81	17.39	14.52	18.76
$\Delta (lnIKSS17)$	10.87	16.34	15.05	14.64	12.23	13.33	14.56
$\Delta (lnIKSS18)$	19.52	11.41	14.67	12.70	14.52	12.44	13.25
$\Delta (lnIKSS19)$	11.44	12.87	13.37	16.65	13.26	11.52	15.15
$\Delta (lnIKSS20)$	12.75	11.88	14.74	18.54	18.68	11.44	20.27
$\Delta (lnIKSS21)$	15.16	16.64	10.87	16.34	11.21	18.75	24.74
$\Delta (lnIKSS22)$	13.37	19.77	11.55	12.45	14.62	11.01	21.22
$\Delta (lnIKSS23)$	12.79	12.00	12.23	13.26	14.33	26.76	15.80
$\Delta (lnIKSS24)$	14.68	13.37	13.36	14.56	16.95	15.01	10.35

$\Delta (lnIKSS025)$	15.85	12.86	14.25	16.23	12.99	15.23	11.22
$\Delta (lnIKSS026)$	11.78	11.26	17.22	11.12	13.59	12.75	18.21
$\Delta (lnIKSS027)$	18.74	15.63	16.62	13.13	14.55	16.36	17.40



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2026 dan Penetapan Kinerja tahun 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :



Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.1
Rencana Aksi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026		PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOMES / OUTPUT	KINERJA TAHUN 2026		ANGGARAN [Rp.]	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,505	2,493	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29	0	1.422.980.200	0,00
Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	0,50	83,43	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	0	546.003.720	0,00
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,11	0,518	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	0	98.500.000	21.691.590,00
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,32	(3,38)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3	0	120.800.000	2.200.000,00
Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,31	0,159	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	0	2.106.800.000	17.359.600,00
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,51	51,782	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	0	144.000.000	3.750.000,00
Meningkatnya Pendapatan Asli	Persentase Realisasi Pencapaian	10,00	16,566	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	0	102.000.000	0,00

Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)								
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,20	0,129	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	0	548.800.000	26.718.300,00
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,36	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	0	342.700.000	0,00

Sumber : Bapenda Prov Sumsel (2026)

3.1.1 Capaian Indikator Tujuan

Tujuan

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

“.....Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....”

Tujuan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dari sisi Pendapatan Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

Dimana:

$KFD_{Provinsi}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
TKD	= Transfer ke Daerah
PTAD	= Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS	= Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS	= Dana Otonomi Khusus
DTI	= Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS	= Dana Istimewa
BP	= Belanja Pegawai
BBH	= Belanja Bagi Hasil
BB	= Belanja Bunga
PUD	= Pembayaran Utang Daerah

Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dengan formula:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Dimana:

$RKFD_{Provinsi-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
$KFD_{Provinsi-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
BP	= Belanja Pegawai Daerah Provinsi

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kinerja kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I tahun 2026 menunjukkan angka peningkatan

Pengukuran data kinerja triwulan 1 tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Data Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW I Tahun 2026

No.	Uraian	Realisasi [Rp.]	KFD	RKFD
[1]	[2]	[3]	[4]	
I	Pendapatan:	1.998.516.826.368,78		
	1. PAD	850.245.439.419,81		
	2. TKD	791.723.913.116,00		
	3. PTAD	0,00		
	4. LLPS	0,00		
	5. SiLPA	356.547.473.832,97		
II	Pengeluaran:	589.165.767.270,00		
	1. OTSUS	0,00		
	2. DTI	0,00		
	3. DAIS	0,00		
	4. BP	565.229.863.730,00		
	5. BBH	23.935.903.540,00		
	6. BB	0,00		
	7. PUD	0,00		
III	KFD		1.409.351.059.098,78	
IV	RKFD			2,493

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [1.998.516.826.368,78] - [589.165.767.270,00]$$

$$KFD_{Provinsi} = 1.409.351.059.098,78$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{1.409.351.059.098,78}{565.229.863.730,00}$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = 2,493$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja kapasitas fiskal daerah tahun 2026 yang telah ditentukan sebesar 2,04, maka realisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 2,493 atau tercapai sebesar 122,206 %.

Realisasi indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2026 sebesar 2,493 hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pendapatan tercapai realisasi sebesar Rp. 1.998.516.826.368,78 sementara dari sisi pengeluaran belanja pemerintah (*government expenditure*) sebesar Rp. 589.165.767.270,00 sehingga kapasitas fiskal daerah diperoleh sebesar Rp. 1.409.351.059.098,78. Kondisi tahun 2026,

sejak tanggal 05 Januari 2025 diberlakukannya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan nilai equivalen sama seperti pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB ini mengatur bahwa perubahan transfer ke Kabupaten/Kota semula dengan pola bagi hasil berubah menjadi *real time payment* ke RKUD Kabupaten/Kota, sehingga pencatatan realisasi dalam akuntansi mengalami penurunan. Dari sisi pengeluaran belanja, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga menambah pengeluaran belanja pegawai.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Pada Ttriwulan I tahun 2026 Dengan Tahun sebelumnya

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend fluktuatif ke triwulan 2025 seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW I Tahun 2026 Dengan TW I 2025

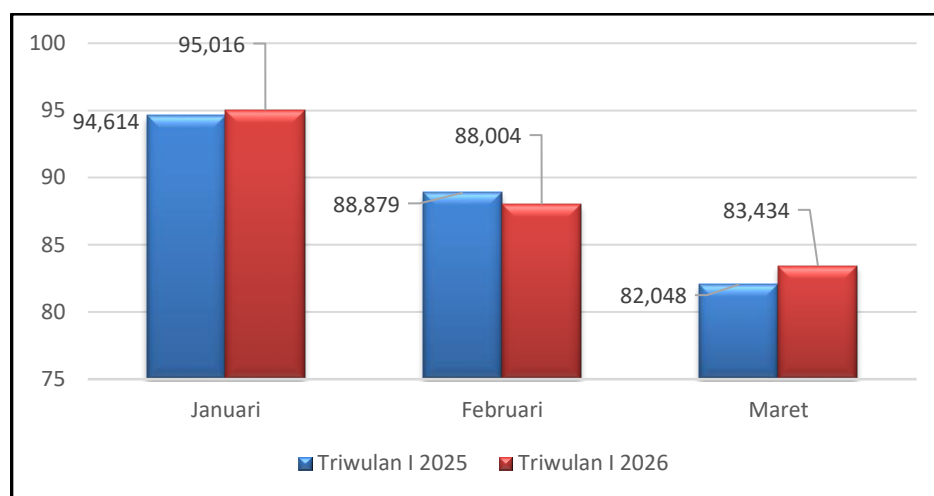
Periodesasi	RKFD		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	5,726	7,015	3,500
Triwulan I 2026	1,817	2,661	2,493

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukkan trend yang terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kapasitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya.

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2026 secara *quartely-on-quartely* mengalami penurunan sebesar 1,007 poin walaupun masih tergolong dalam kapasitas sedang.



Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Triwulan I Tahun 2025 dengan TW I Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Jangka Menengah

Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam dokumen jangka menengah RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,28. Realisasi pada Triwulan I 2026 sebesar 2,493 dengan capaian sebesar 122,206 %.

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,493	2,28	109,34

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Kondisi ketercapaian kinerja indeks kapasitas fiskal daerah tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan tingkat kemajuan sebesar 109,34 %, yang akan dicapai pada selama tahun 2026 – 2030 menunjukkan kapasitas Fiskal Sumsel di triwulan I sudah memenuhi target.

Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Uraian	Jumlah							
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
1	OTSUS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	DTI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	DAIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	BP	Rp	565,229,863,730.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	BBH	Rp	23,935,903,540.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	BB	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Total	Rp	589,165,767,270.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + \text{Pembayaran Pokok PUD}]$$

Dimana:

KFD _{provinsi}	=	Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
TKD	=	Transfer ke Daerah
PTAD	=	Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SILPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTUS	=	Dana Otonomi Khusus
DTI	=	Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS	=	Dana Istimewa
BP	=	Belanja Pegawai
BBH	=	Belanja Bagi Hasil
BB	=	Belanja Bunga
PUD	=	Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja\ Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Keterangan:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \text{Rasio Kapasitas Fiskal Daerah}$$

KFD Provinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah

Belanja Pegawai Provinsi = Belanja Pegawai

[illegible][illegible]

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 800,547,217,519.50	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 4,509,197,075,145.67
2	TKD	Rp 898,776,605,481.00	Rp 2,095,968,136,816.00	Rp 3,339,256,598,442.00	Rp 5,324,669,952,557.00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp 2,708,616,000.00	Rp 4,062,924,000.00
5	SILPA	Rp 911,033,505,651.00	Rp 1,794,023,508,720.22	Rp 1,705,434,949,456.33	Rp 480,611,808,891
Total		Rp 2,610,357,328,651.50	Rp 6,132,883,793,794.01	Rp 8,248,973,005,352.26	Rp 10,318,541,760,593.20

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 576,853,060,331.00	Rp 1,124,281,074,234.00	Rp 1,630,593,390,704.00	Rp 2,818,836,811,555.00
5	BBH	Rp 14,580,850,206.00	Rp 895,685,040,219.50	Rp 1,543,243,887,030.89	Rp 3,118,456,750,251.30
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 591,433,910,537.00	Rp 2,019,966,114,453.50	Rp 3,173,837,277,734.89	Rp 5,937,293,561,806.30

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 2,018,923,418,114.50	Rp 4,112,917,679,340.51	Rp 5,075,135,727,617.37	Rp 4,381,248,198,786.93
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	3.500	3.658	3.112	1.554

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 234,946,670,500.43	Rp 492,937,700,312.46	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,442,390,252,850.91	Rp 1,728,676,011,382.43	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,408,459,834,492.57	Rp 2,711,986,454,517.24	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,209,630,288,631.97	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	TKD	Rp 370,166,981,506.10	Rp 855,146,952,061.00	Rp 898,776,605,481.00	Rp 1,317,398,328,861.00	Rp 1,688,075,606,336.00	Rp 2,095,968,136,816.00	Rp 2,474,024,398,866.00	Rp 3,285,657,660,772.00	Rp 3,339,256,598,442.00	Rp 3,390,406,370,678.00	Rp 4,992,690,055,792.00	Rp 5,324,669,952,557.00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp 1,354,308,000.00	Rp 2,031,462,000.00	Rp 2,708,616,000.00	Rp 2,708,616,000.00	Rp 3,385,770,000.00	Rp 4,062,924,000.00
5	SILPA	Rp 534,741,994,674.79	Rp 1,103,848,724,368.84	Rp 911,033,505,651.00	Rp 1,638,002,186,525.87	Rp 1,914,008,302,821.05	Rp 1,794,023,508,720.22	Rp 1,600,870,097,753.00	Rp 1,939,507,314,860.07	Rp 1,705,434,949,456.33	Rp 720,042,671,239.43	Rp 1,082,013,492,798.21	Rp 480,611,808,890.56
Total		Rp 1,139,855,646,675.22	Rp 2,451,933,376,742.30	Rp 2,610,357,328,651.50	Rp 4,397,790,768,237.78	Rp 5,330,759,920,539.48	Rp 6,132,883,793,794.01	Rp 6,484,708,639,111.57	Rp 7,939,182,892,149.31	Rp 8,248,973,005,352.26	Rp 7,322,787,946,549.40	Rp 10,089,280,682,790.50	Rp 10,318,541,760,593.20

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 169,473,829,155.00	Rp 305,916,090,863.00	Rp 576,853,060,331.00	Rp 715,706,127,760.00	Rp 866,588,743,536.00	Rp 1,124,281,074,234.00	Rp 1,301,925,899,499.00	Rp 1,458,341,338,291.00	Rp 1,630,593,390,704.00	Rp 1,793,680,424,057.00	Rp 2,368,059,610,553.00	Rp 2,818,836,811,555.00
5	BBH	Rp -	Rp -	Rp 14,580,850,206.00	Rp 125,756,146,816.00	Rp 125,756,146,816.00	Rp 895,685,040,219.50	Rp 1,192,445,261,251.50	Rp 1,573,953,279,634.10	Rp 1,543,243,887,030.89	Rp 2,030,710,308,439.23	Rp 2,861,633,754,435.13	Rp 3,118,456,750,251.30
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 169,473,829,155.00	Rp 305,916,090,863.00	Rp 591,433,910,537.00	Rp 841,462,274,576.00	Rp 992,344,890,352.00	Rp 2,019,966,114,453.50	Rp 2,494,371,160,750.50	Rp 3,032,294,617,925.10	Rp 3,173,837,277,734.89	Rp 3,824,390,732,496.23	Rp 5,229,693,364,988.13	Rp 5,937,293,561,806.30

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 970,381,817,520.22	Rp 2,146,017,285,879.30	Rp 2,018,923,418,114.50	Rp 3,556,328,493,661.78	Rp 4,338,415,030,187.48	Rp 4,112,917,679,340.51	Rp 3,990,337,478,361.07	Rp 4,906,888,274,224.21	Rp 5,075,135,727,617.37	Rp 3,498,397,214,053.17	Rp 4,859,587,317,802.33	Rp 4,381,248,198,786.93
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	5.726	7.015	3.500	4.969	5.006	3.658	3.065	3.365	3.112	1.950	2.052	1.554

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SILPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

Dimana:
KFD_{provinsi} = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD = Pendapatan Asli Daerah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS = Dana Otonomi Khusus
DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS = Dana Istimewa
BP = Belanja Pegawai
BBH = Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{provinsi} = \frac{KFD_{provinsi}}{Belanja Pegawai_{provinsi}}$$

Keterangan:
RKFD_{provinsi} = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
KFD_{provinsi} = Kapasitas Fiskal Daerah
Belanja Pegawai_{provinsi} = Belanja Pegawai

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera).

Tabel 3.5

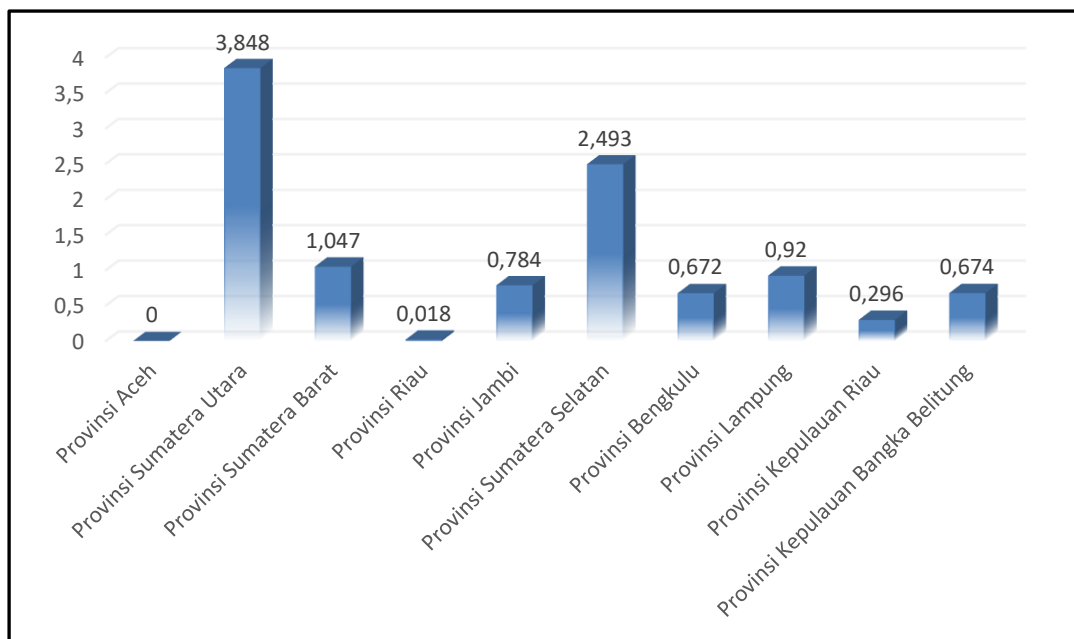
Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional

No.	Provinsi Pulau Sumatera	Kinerja Tahun 2025	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	Provinsi Aceh	0,788	Sedang
2.	Provinsi Sumatera Utara	1,473	Tinggi
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,535	Rendah
4.	Provinsi Riau	0,747	Rendah
5.	Provinsi Jambi	0,574	Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1,098	Sedang
7.	Provinsi Bengkulu	0,432	Rendah
8.	Provinsi Lampung	0,798	Sedang
9.	Provinsi Kepulauan Riau	0,740	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,306	Rendah

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Data tahun 2025, posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 2 (dua) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara data realisasi Triwulan I tahun 2026, kinerja kapasitas fiskal daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah dengan perbandingan pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi Triwulan I tahun 2026 pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,848, kemudian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,493. Indeks kapasitas fiskal daerah terendah pada Provinsi Riau sebesar 0,018, sementara posisi indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi kedua dengan indeks sebesar 2,493.

3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,505	2,493	496,61	Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Memfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun 2009	
						Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja	
						Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah berbasis mitigasi risiko	
						Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to door service	
						Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks kapasitas fiskal daerah dengan strategi:

1. Melaksanakan kegiatan *door to door service* yang merupakan bentuk penagihan pajak bagi wajib pajak dari satuan rumah tangga yang dilaksanakan penagihan;
2. Melaksanakan *updating* basis data pajak daerah untuk mencapai tingkat keakuratan data pajak sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk sosialisasi langsung, penyebaran leaflet, booklet, sosial media serta media lainnya ke masyarakat untuk mematuhi ketentuan bayar pajak sesuai dengan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan sehingga pembangunan Sumatera Selatan terus berjalan;
4. Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sehingga jangkauan layanan pembayaran pajak sampai ke tingkat kelurahan atau pedesaan;
5. Mempercepat proses deregulasi beberapa peraturan yang terkait dengan pajak daerah untuk memastikan kapasitas dan supremasi hukum di bidang perpajakan;
6. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pembina Samsat di tingkat Provinsi untuk memastikan dukungan kinerja dari pihak Kepolisian dan Jasa Raharja;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.

Tabel 3.7
Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,505	2,493	496,61	1.422.980.200	0,00	0,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien - Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> - Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja - Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan - Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17 Desember 2025

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	0,505	2,493	496,61	1.422.980.200	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator tujuan belum dihitung pada Triwulan I tahun 2026.

3.1.1.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	1.422.980.200,00	0,00	0,00	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	1.422.980.200,00	0,00	0,00	-
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				1.422.980.200,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH						1.422.980.200,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah belum dihitung pada Triwulan I tahun 2026.

3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	496,61	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	12,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang

				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7,76	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang

				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.1.8 Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.11
Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		219.574.57.092,00	23.293.562.842,00	10,61
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.600.000,00	0,00	0,00
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00	0,00	0,00
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	73.000.000,00	0,00	0,00
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000,00	0,00	0,00
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.329.148.028,00	20.565.828.524,00	12,44
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.009.908.028,00	20.544.995.474,00	12,45
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.240.000,00	0,00	0,00
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	120.000.000,00	20.833.050,00	17,36
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	0,00	0,00
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	0,00	0,00
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	288.400.000,00	224.233.306,00	2,88
	4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	102.000.000,00	0,00	0,00
	4.2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.000.000,00	3.750.000,00	2,60
	4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000,00	4.560.000,00	10,75
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	682.800.000,00	0,00	0,00
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.800.000,00	0,00	0,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.800.000,00	0,00	0,00
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	293.200.000,00	0,00	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.264.606.580,00	19.586.238.672,00	0,45
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.069.080,00	0,00	0,00
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000,00	0,00	0,00
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00	0,00	0,00
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.130.337.500,00	0,00	0,00
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.300.000.000,00	0,00	0,00
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00	5.320.000,00	16,63
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.800.000,00	5.744.500,00	5,70
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.000.000,00	70.356.591,00	10,99
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000,00	0,00	0,00

	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.400.000.000,00	0,00	0,00
	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	7.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	400.000.000,00	0,00	0,00
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.778.683.402,00	2.638.003.227,00	9,50
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.800.000,00	150.000,00	0,41
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.659.234.198,00	585.282.277,00	22,01
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.800.000,00	0,00	0,00
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.883.849.204,00	2.052.570.950,00	8,25
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.587.134.082,00	0,00	0,00
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.307.134.082,00	0,00	0,00
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.630.000.000,00	0,00	0,00
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00
	9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.350.000.000,00	0,00	0,00
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		120.800.000,00	2.200.000,00	1,82
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.972.583.920,00	109.202.770,00	1,83
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.972.583.920,00	109.202.770,00	1,83
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000,00	26.718.300,00	4,87
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000,00	0,00	0,00
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82
	1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	510.000.000,00	39.555.280,00	7,76
	1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000,00	21.691.590,00	22,02
	1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	70.000.000,00	3.878.000,00	5,54
	1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.003.720,00	0,00	0,00
	1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000,00	0,00	0,00
	1.9	Penagihan Pajak Daerah	1.422.980.200,00	0,00	0,00
	1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
	1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.600.000,00	0,00	0,00
	1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
	1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60.200.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH		225.667.956.012,00	23.404.965.612	10,37

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.2 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

".....*Revenue mobilization* merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah....."

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Formula perhitungan IKSS.1:

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum APBD Perubahan)}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

y = Nilai Deviasi

PAD = Realisasi PAD tahun ke n

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebelum perubahan)

3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran realisasi data kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026:

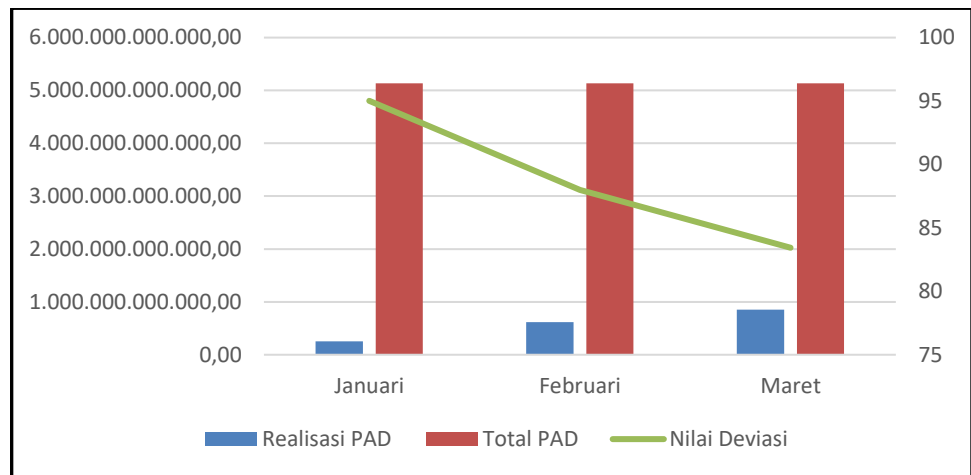
Tabel 3.12
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1

No.	Bulan	Realisasi PAD	Total PAD	Nilai Deviasi	Target Tahunan 2026
1.	Januari	255.787.714.620,69	5.132.383.462.643,00	95,016	6,00
2.	Februari	615.693.471.321,08	5.132.383.462.643,00	88,004	
3.	Maret	850.245.439.419,81	5.132.383.462.643,00	83,434	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

$$\text{Capaian kinerja tahun 2026} = \frac{83,434}{6,000} \times 100\% = 1390,57 \%$$

Capaian kinerja untuk IKSS.1 triwulan I tahun 2026 mencapai 1390,57%, menunjukkan bahwa pendapatan termobilisasi dengan baik, dengan nilai deviasi yang semakin menurun pada trend bulanan.



Gambar 3.3
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD TW I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Dengan indikatornya untuk mendekatkan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) pada garis normal yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik. Kinerja indikator *revenue mobilization* pada Triwulan I tahun 2026 dengan realisasi sebesar 83,434 menggambarkan kondisi bahwa kondisi sementara kredibilitas atas kepercayaan pendapatan asli daerah.

- 3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
- Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026 mencapai 83,434%, dimana

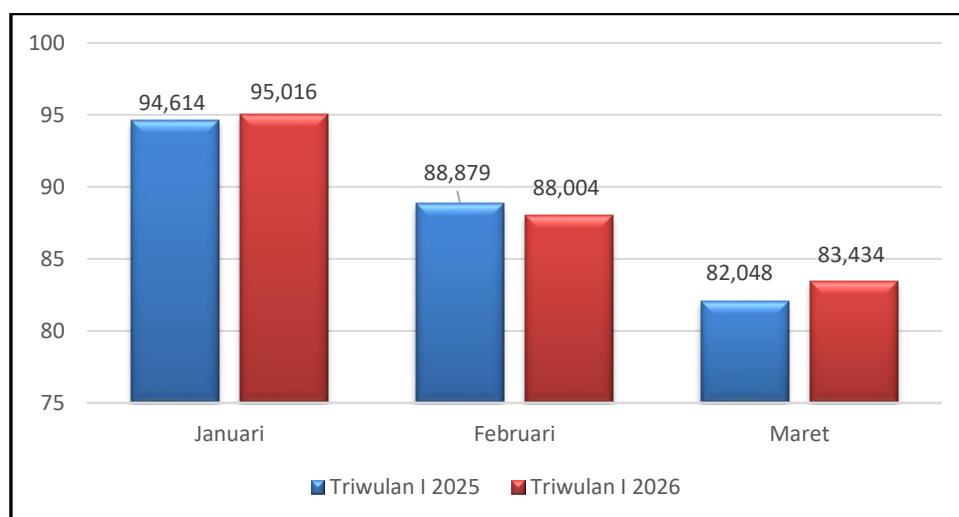
Tabel 3.13

Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1 TW I 2026 dengan TW I 20265

Periodesasi	Nilai Deviasi		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	94,614	88,879	82,048
Triwulan I 2026	95,016	88,004	83,434

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Perbandingan realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026 sebesar 83,434 % mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 82,048 % atau turun sebesar 1,386 %, hal ini menunjukkan kinerja yang belum baik dari Triwulan I tahun 2025 (makin menjauh dari garis normal).

**Gambar 3.4**

Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD TW I 2025 Dengan TW I Tahun 2026

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pendapatan Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption* mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB

mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swasta melakukan penghematan energi (BBKB). Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026 sebesar 83,434 dan terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka menengah bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 13,146 %.

Tabel 3.14
Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1 Terhadap Target Realisasi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	83,434	8,51	980,42

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kinerja indikator *revenue mobilization* pada Triwulan I ini, apabila dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra tahun 2025 – 2029 mencapai tingkat kemajuan 980,42 %, kondisi ini harus dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada kondisi perencanaan awal

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

SS.1 :	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS :	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$$

Dimana :

- y = Nilai Deviasi
- Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
- Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 850,245,439,419.81	Rp 5,132,383,462,643.00	83.4337
2	Triwulan II	Rp -	Rp -	#DIV/0!
3	Triwulan III	Rp -	Rp -	#DIV/0!
4	Triwulan IV	Rp -	Rp -	#DIV/0!

[illegible]

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	
SS.1 :	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS :	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization)

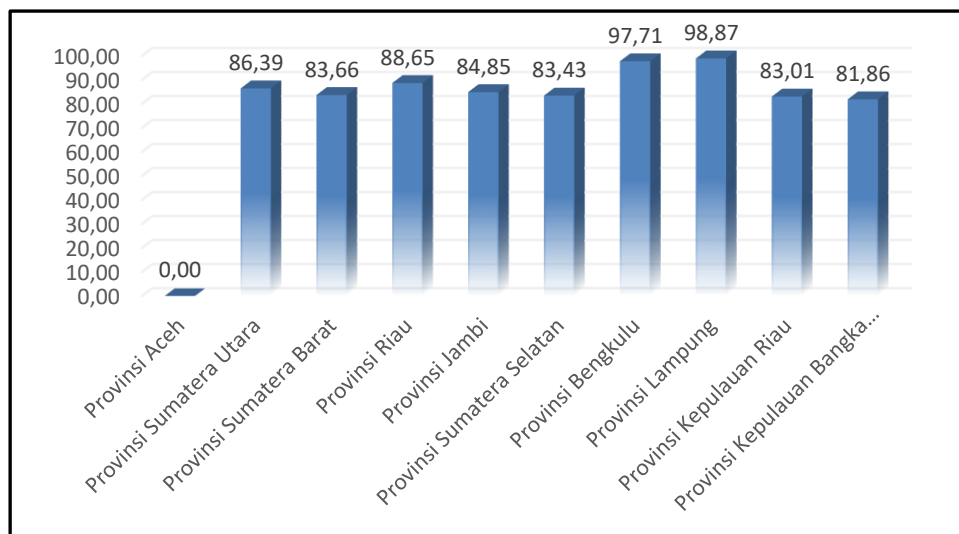
$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$$

Dimana :
y = Nilai Deviasi
Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800,547,217,519.50	Rp 4,459,311,556,974.00	82.0477
2	Triwulan II	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 4,459,311,556,974.00	49.7032
3	Triwulan III	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 4,459,311,556,974.00	28.2048
4	Triwulan IV	Rp 4,509,197,075,145.67	Rp 4,459,311,556,974.00	1.1187

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240,196,687,137.67	Rp 495,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,796,709.94	Rp 2,920,093,533,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,730,677,293,545.70	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	Total PAD dalam APBD	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.00
	Nilai Deviasi	94.6136	88.8792	82.0477	67.3299	60.9769	49.7032	41.3217	34.5169	28.2048	16.3396	10.0491	1.1187

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:



Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 83,43 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Lampung dengan nilai deviasi sebesar 98,87. Kondisi kredibilitas *revenue mobilization* pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak membayar pajak.

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	0,50	83,434	16.686	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja indikator *revenue mobilization* sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
4. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
5. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
6. Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive;
7. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
8. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TW I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	0,50	83,434	16.686	546.003.720	0,00	0,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.2.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.17

Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	0,50	83,434	16.686	546.003.720,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*) pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.2.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.18
Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	546.003.720,00	0,00	0,00	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	546.003.720,00	0,00	0,00	-
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				546.003.720,00	0,00	0,00	
	JUMLAH						546.003.720,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.19
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja IKSS 1

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	83,434	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan Penyebarluasan Pajak Daerah	dan Kebijakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.3 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2

Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, revaluasi atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Seiring dengan mandat Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih

representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan desentralisasi fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Formula Perhitungan IKSS.2:

$$IKF = 1 - \left(\frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$$

Dimana:

IKF = Indeks Kemandirian Fiskal

Tr_{GP} = *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

Tr_{SP} = Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B = *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH = Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Kehutanan

REV_{OR} = Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 = Nilai Invers

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026

Pengukuran data kinerja:

Tabel 3.20

Pengukuran Realisasi Data Kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Triwulan I Tahun 2026

No.	Uraian		Realisasi [Rp.]
[1]	[2]		[3]
I	Pembilang:		
	1	Tr _{GP}	348.778.014.000,00
	2	Tr _{SP}	373.689.009.216,00
	3	B	0,00
	4	REVSH	69.256.889.900,00
	Sub Total I		791.723.913.116,00
II	Penyebut:		
	1	REV _{OR}	850.245.439.419,81
	2	Tr _{GP}	348.778.014.000,00
	3	Tr _{SP}	373.689.009.216,00
	4	B	0,00
	5	REVSH	69.256.889.900,00
	Sub Total II		1.641.969.352.535,81

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

$$\text{Capaian 2025: IKF} = 1 - \left(\frac{791.723.913.116,00}{1.641.969.352.535,81} \right) = 0,518$$

Capaian indeks kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 sebesar 113,10 % yang mengindikasikan bahwa pada Triwulan I ini Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom dengan kategori mandiri karena diatas 50% . Dalam membiayai pembangunan untuk Triwulan I di Sumatera Selatan tidak mempunyai ketergantungan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

$$\text{Terhadap target tahun 2026, nilai IKF} = \frac{0,518}{0,458} \times 100 \% = 113,10\%$$

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025

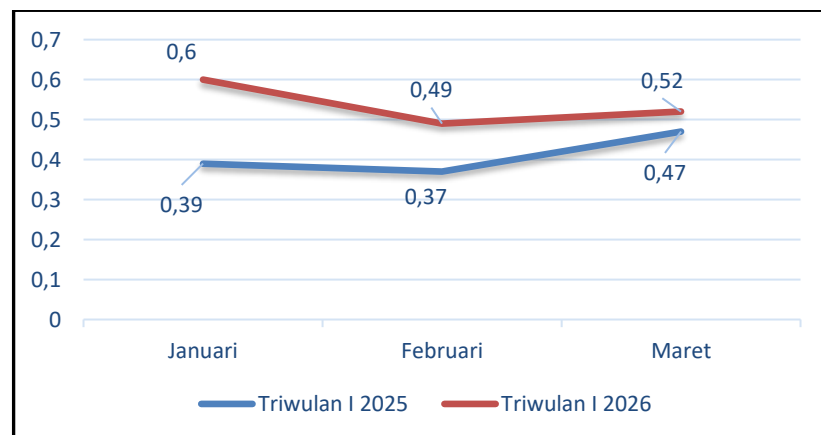
Nilai realisasi capaian kinerja IKSS.2 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun, posisi indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan mengalami fluktuatif antara mandiri dan menuju mandiri.

Tabel 3.21

Pengukuran Realisasi IKSS 2 TW I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Periodesasi	Indeks Kemandirian Fiskal		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	0,39	0,37	0,47
Triwulan I 2026	0,60	0,49	0,52

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026



Gambar 3.6

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal TW I 2026 dengan TW I 2025

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.2	:	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
IKSS	:	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TrGP	Rp 486,492,112,670.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,707,438,208,818.00
2	TrSP	Rp 7,055,512,461.00	Rp 362,230,490,246.00	Rp 547,785,603,568.00	Rp 1,130,609,940,339.00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 405,228,980,350.00	Rp 945,516,417,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 2,080,184,935,400.00
Total		Rp 898,776,605,481.00	Rp 2,095,968,136,816.00	Rp 3,332,767,305,442.00	Rp 4,918,233,084,557.00

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REVoR	Rp 800,547,217,519.50	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 4,509,197,075,145.67
5	TrSP	Rp 486,492,112,670.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,707,438,208,818.00
3	TrSP	Rp 7,055,512,461.00	Rp 362,230,490,246.00	Rp 547,785,603,568.00	Rp 1,130,609,940,339.00
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 405,228,980,350.00	Rp 945,516,417,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 2,080,184,935,400.00
Total		Rp 1,699,323,823,000.50	Rp 4,338,860,285,073.79	Rp 6,534,340,146,895.93	Rp 9,427,430,159,702.67

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal	0.5289	0.4831	0.5100	0.5217
IKF Invers	0.4711	0.5169	0.4900	0.4783

$$\left(\frac{[TrGP + TrSP + B + REVSH]}{REVoR + TrGP + TrSP + B + REVSH} \right)$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana
Kearifan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi
Hasil dan Bantuan Keuangan)
TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
Badalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVoR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 243,345,202,000.00	Rp 365,017,803,300.00	Rp 486,492,112,670.00	Rp 666,548,627.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 1,031,586,430,670.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,515,673,613,354.00	Rp 1,515,673,613,354.00	Rp 1,707,438,208,818.00
2	TrSP	Rp -	Rp 275,132,837,961.00	Rp 7,055,512,461.00	Rp 344,913,670,956.00	Rp 394,532,065,681.00	Rp 362,230,490,246.00	Rp 532,677,888,716.00	Rp 786,810,709,818.00	Rp 547,785,603,568.00	Rp 861,068,863,569.00	Rp 1,079,980,757,438.00	Rp 1,130,609,940,339.00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 126,821,779,500.00	Rp 214,996,311,100.00	Rp 405,228,980,350.00	Rp 613,868,338,750.00	Rp 813,254,620,500.00	Rp 945,516,417,900.00	Rp 1,199,349,976,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 1,738,277,713,800.00	Rp 2,390,546,392,000.00	Rp 2,080,184,935,400.00
Total		Rp 370,166,981,500.00	Rp 855,146,952,361.00	Rp 898,776,605,481.00	Rp 959,448,558,333.00	Rp 1,996,007,914,851.00	Rp 2,095,968,136,816.00	Rp 2,763,614,296,286.00	Rp 3,571,792,411,692.00	Rp 3,332,767,305,442.00	Rp 4,115,020,190,723.00	Rp 4,986,200,762,792.00	Rp 4,918,233,084,557.00

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	REVoR	Rp 240,196,687,137.67	Rp 495,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,706,709.94	Rp 2,920,093,533,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,730,677,293,545.70	Rp 4,011,191,364,200	Rp 4,509,197,075,146
2	TrSP	Rp 243,345,202,000.00	Rp 365,017,803,300.00	Rp 486,492,112,670.00	Rp 666,548,627.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 788,221,228,670.00	Rp 1,031,586,430,670.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,262,251,710,974.00	Rp 1,515,673,613,354.00	Rp 1,515,673,613,354	Rp 1,707,438,208,818
3	TrSP	Rp -	Rp 275,132,837,961.00	Rp 7,055,512,461.00	Rp 344,913,670,956.00	Rp 394,532,065,681.00	Rp 362,230,490,246.00	Rp 532,677,888,716.00	Rp 786,810,709,818.00	Rp 547,785,603,568.00	Rp 861,068,863,569.00	Rp 1,079,980,757,438	Rp 1,130,609,940,339
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 126,821,779,500.00	Rp 214,996,311,100.00	Rp 405,228,980,350.00	Rp 613,868,338,750.00	Rp 813,254,620,500.00	Rp 945,516,417,900.00	Rp 1,199,349,976,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 1,522,729,990,900.00	Rp 1,738,277,713,800.00	Rp 2,390,546,392,000.00	Rp 2,080,184,935,400
Total		Rp 610,363,668,637.67	Rp 1,351,055,896,445.99	Rp 1,699,323,823,000.50	Rp 2,416,308,081,379.22	Rp 3,736,168,857,076.74	Rp 4,338,860,285,073.79	Rp 5,380,263,002,995.94	Rp 6,491,885,945,175.03	Rp 6,534,340,146,895.93	Rp 7,845,697,484,268.70	Rp 8,997,392,126,992.25	Rp 9,427,430,159,702.67

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0.606	0.633	0.529	0.397	Rp 0.534	0.483	0.514	0.550	0.510	0.524	0.554	0.522
	IKF Invers	0.394	0.367	0.471	0.603	0.466	0.517	0.486	0.450	0.490	0.476	0.446	0.478

Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada Bulan Januari tahun 2026 dengan nilai IKF sebesar 0,6 dan terendah terjadi pada Bulan Februari tahun 2026 dengan nilai IKF sebesar 0,49.

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan pada TW I 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan I Tahun 2026 dan Target RPJMD

No.	Uraian	Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja
		Realisasi TW I 2026	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,518	0,520	99,62 %
2.	Pendapatan	1.641.969.352.535,81	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	791.723.913.116,00	6.468.639.847.802,56	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam

RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 99,62 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2026 sudah sesuai (*on the track*) untuk mencapai target optimis akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 serta akhir periode Renstra tahun 2025 – 2029 dimana Triwulan I tahun 2026 ini sudah mencapai sebesar 99,62 %

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan I Tahun 2026

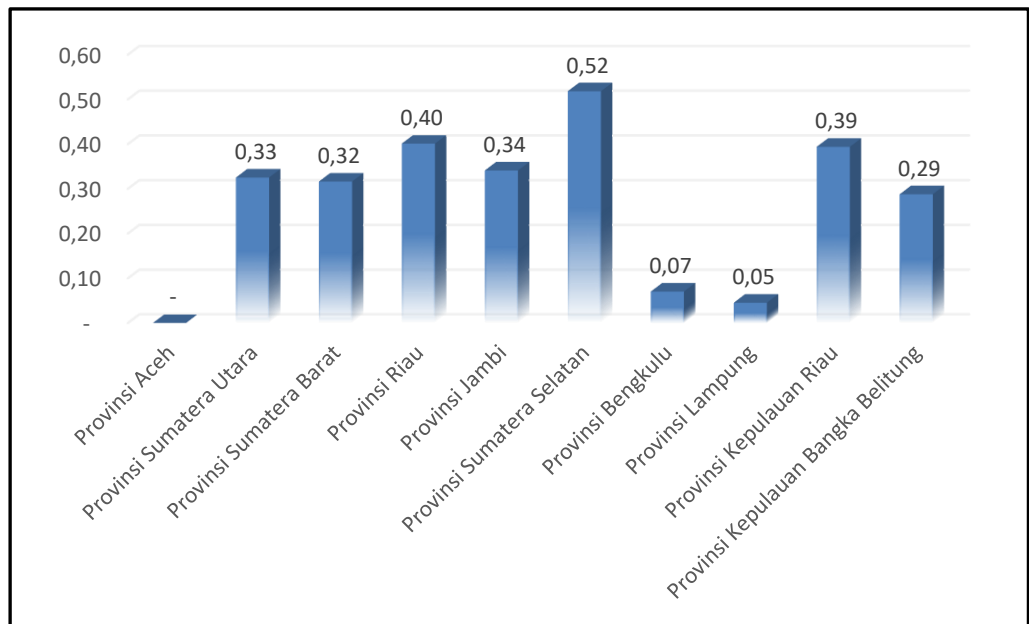
No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,518	0,520	99,62

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada Triwulan I tahun 2026 telah mencapai 99,62 % hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.7

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Provinsi dengan nilai IKF tertinggi pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,52 dengan kategori mandiri sementara nilai IKF terendah pada Provinsi Lampung dengan nilai IKF 0,05 dengan kategori belum mandiri. Posisi Provinsi Sumatera Selatan pada urutan pertama dengan nilai IKF 0,52 dengan kategori daerah sudah mandiri kemandirian fiskal.

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,11	0,518	470,91	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah, antara lain:

1. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak daerah, bersama dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan razia;
2. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
4. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
5. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
6. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
7. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
10. Terus melaksanakan program ekstensifikasi pajak daerah atau memperluas pendaftaran objek pajak daerah melalui peran investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.25
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN TW I 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,11	0,518	470,91	98.500.000	21.691.590,00	22,02	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung:</u> - Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data - Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern - Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah - Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah - Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui platform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.26
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	0,11	0,518	470,91	98.500.000	21.691.590,00	22,02	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.3.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.27
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			94,46	86,71	91,79	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	86,71	91,79	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	98.500.000,00	21.691.590,00	22,02	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	98.500.000,00	21.691.590,00	22,02	-
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				98.500.000,00	21.691.590,00	22,02	
	JUMLAH						219.300.000,00	23.891.590,00	10,89	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.3.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.28
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	113,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7,76	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah"

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah (*government expenditure*) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja daerah (*government expenditure*). Ketika konsumsi belanja daerah dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi *multiplier effect* dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi yang berdampak pada permintaan akan barang dan jasa serta modal akan mengalami kenaikan, jika hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi

Formula Perhitungan IKSS.3

$$y = \left(\frac{[Pendapatan \text{ tahun } n - Pendapatan \text{ tahun } (n - 1)]}{Pendapatan \text{ tahun } (n - 1)} \right) \times 100 \%$$

Dimana:

y = Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD

Pendapatan n = Realisasi Pendapatan tahun berjalan

Pendapatan (n-1) = Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya

3.1.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran data kinerja Triwulan I tahun 2026 :

Tabel 3.29
Pengukuran Data Kinerja IKSS 3 TW I Tahun 2026

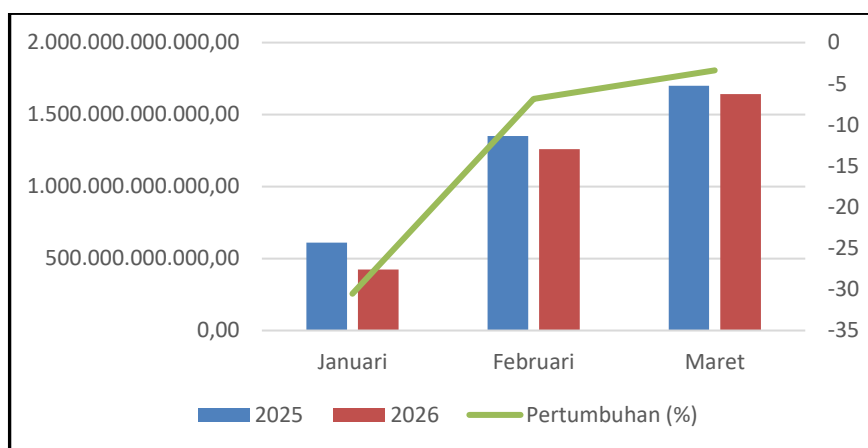
No.	Bulan	Realisasi Pendapatan [Rp.]		Pertumbuhan (%)	Target Tahunan 2026
		2025	2026		
1.	Januari	610.363.668.637,67	424.031.881.720,69	(30,528)	1,28
2.	Februari	1.351.055.896.145,99	1.258.765.484.321,08	(6,831)	
3.	Maret	1.699.323.823.000,50	1.641.969.352.535,81	(3,375)	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel(2026)

Capaian kinerja IKSS.3 Triwulan I tahun 2026 secara *quarterly-on-quarterly* mengalami pertumbuhan negatif sebesar (3,375%), maupun secara *month-to-month*.

Terhadap target tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029, capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{(3,375)}{1,28} \times 100\% = (2,64\%)$$



Gambar 3.8

Grafik Pertumbuhan Pendapatan daerah Terhadap PAD dalam APBD TW I 2026

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pertumbuhan pendapatan Triwulan I tahun 2026 mengalami pertumbuhan atau kontraksi negatif sebesar (3,375 %), hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang mulai diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2025. Namun melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah karena perlambatan struktur ekonomi daerah, kebijakan ini di samakan dengan equivalen yang berarti tidak ada pembebanan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak daerah.

3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Dengan Triwulan I 2025

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan dalam APBD (IKSS.3) Triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan pada tahun Triwulan I tahun 2025 tergambar pada kinerja sebagai berikut:

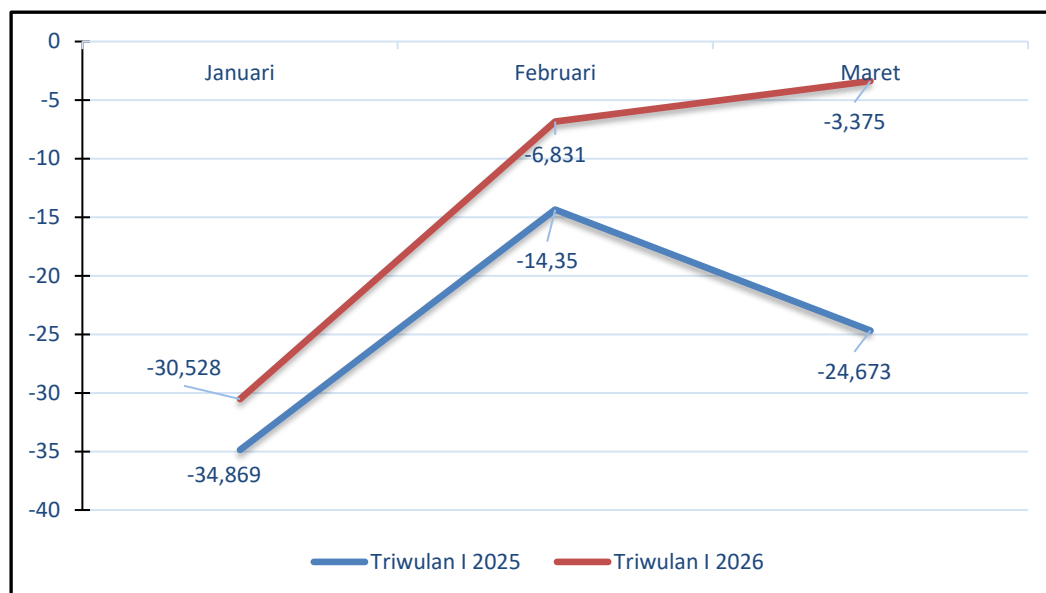
Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 TW I 2026 dengan TW I Tahun 2025

Periodesasi	Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	(34,869)	(14,350)	(24,673)
Triwulan I 2026	(30,528)	(6,831)	(3,375)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar (3,375 %) dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025 meningkat sebesar 21,3 %.



Gambar 3.9
Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Sumsel TW I 2026 dengan TW I 2025
 Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan pada TW I 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB). Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

S :	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
H :	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\%$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan $n-1$ = Pendapatan tahun ke $(n-1)$

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2026	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prop. Sumsel TW I	Rp 1.641,969,932,535.81	Rp 1.699,328,823,000.50	- 3.37%
2	Pendapatan Daerah Prop. Sumsel TW II	Rp -	Rp -	#DIV/0!
3	Pendapatan Daerah Prop. Sumsel TW III	Rp -	Rp -	#DIV/0!
4	Pendapatan Daerah Prop. Sumsel TW IV	Rp -	Rp -	#DIV/0!

[illegible]

	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	
SS.3	:	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
IKSS	:	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2025	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I	Rp 1,699,323,823,000.50	Rp 2,255,925,057,076.74	-24.673
2	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW II	Rp 4,338,860,285,073.79	Rp 4,687,788,699,397.97	-7.443
3	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW III	Rp 6,543,538,055,895.93	Rp 7,510,343,386,396.40	-12.873
4	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV	Rp 9,837,929,951,702.67	Rp 10,962,497,244,934.50	-10.258

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

No.	TAHUN	PENDAPATAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	2024	Rp 937,131,162,833.45	Rp 1,577,409,132,494.04	Rp 2,255,925,057,076.74	Rp 3,291,459,189,500.31	Rp 3,955,287,842,849.47	Rp 4,687,788,699,397.97	Rp 5,651,408,054,185.98	Rp 7,058,362,580,031.98	Rp 7,510,343,386,396.40	Rp 9,034,450,070,781.23	Rp 10,962,497,244,934.50	Rp 10,962,497,244,934.50
2	2025	Rp 610,363,668,637.67	Rp 1,351,055,896,145.99	Rp 1,699,323,823,000.50	Rp 3,082,180,160,422.22	Rp 3,736,168,857,076.74	Rp 4,338,860,285,073.79	Rp 5,383,297,239,495.94	Rp 6,498,375,238,175.03	Rp 6,543,538,055,895.93	Rp 8,252,134,352,268.70	Rp 9,007,267,789,992.25	Rp 9,837,929,951,702.67
% Pertumbuhan Pendapatan Daerah		-34.869	-14.350	-24.673	-6.3582	-5.540	-7.443	-4.744	-7.934	-12.873	-8.659	-17.836	-10.258

3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) tahun 2025 terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Target RPJMD 2030	
1.	2025	1.699.323.823.000,50		(3,375)
2.	2026	1.641.969.352.535,81		
dst				
3.	2029		12.731.101.473.657,10	6,43
4.	2030		13.549.281.593.204,80	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah Triwulan I tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{[(3,375)]}{6,43} \times 100\% = (52,49\%)$$

Tabel 3.32

Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(3,35)	1,48	(2,28)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025 – 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar (2,28 %), hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB dan

Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10 (sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Triwulan I 2025	Triwulan I 2026	
1.	Aceh	2.032.493.212.048,20	0,00	(0,00)
2.	Sumatera Utara	4.022.870.503.106,30	2.915.102.272.375,00	(27,537)
3.	Sumatera Barat	2.003.329.883.523,70	1.487.323.169.015,80	(25,757)
4.	Riau	2.403.321.520.347,20	870.017.014.172,11	(63,799)
5.	Jambi	1.240.926.262.935,30	491.467.392.412,47	(60,395)
6.	Sumatera Selatan	1.641.969.352.535,81	1.699.323.823.000,50	(3,375)
7.	Bengkulu	800.019.986.876,45	112.625.049.497,00	(85,922)
8.	Lampung	1.950.479.753.400,80	45.452.964.118,98	(97,570)
9.	Kepulauan Riau	1.234.502.850.880,40	490.924.699.514,00	(60,233)
10.	Kepulauan Bangka Belitung	667.955.346.403,24	367.844.906.782,53	(44,930)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2025)

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara *quarterly-on-quarterly* wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar (3,375 %) sementara pertumbuhan negatif tertinggi berada pada Provinsi Lampung (97,570 %).

3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,32	(3,375)	(1.054,69)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023
						Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota	Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD
						Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan	Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif
						Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi	Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan
						Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
2. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan;
5. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
7. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TW I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,32	(3,375)	(1.054,69)	120.800.000	2.200.000,00	1,82	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,32	(3,375)	(1.054,69)	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	0,00	0,00	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,46	0,00	0,00	120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-
		1.1 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	
	JUMLAH					120.800.000,00	2.200.000,00	1,82	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(2,64)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	12,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	7,76	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

*".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."*

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula

tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formula Perhitungan IKSS.4:

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{k=18}^{i=1} (Pajak Daerah Provinsi + Pajak Daerah Kabupaten/Kota)}{Total PDRB} \times 100 \%$$

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKSS.4 Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.39

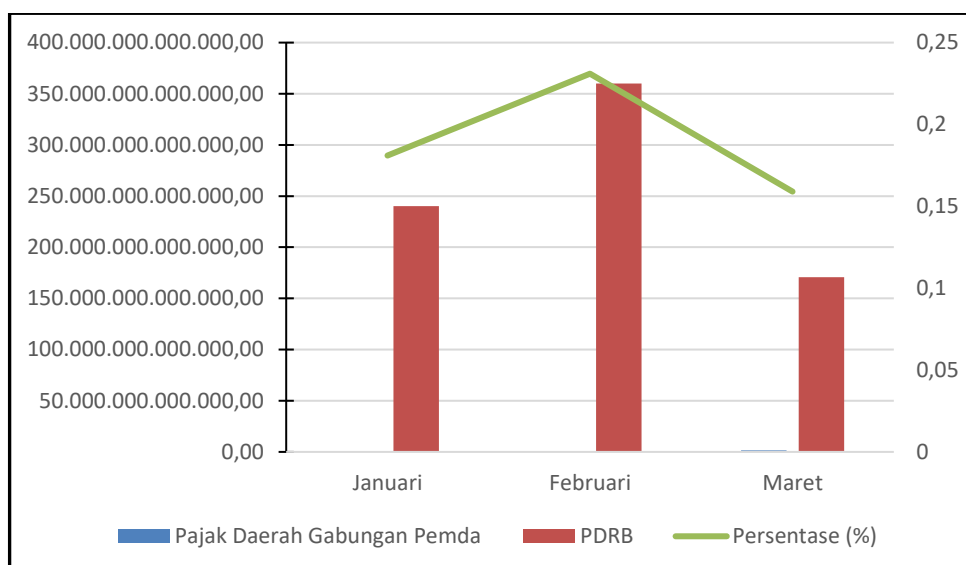
Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara target dan Realisasi IKSS.4 Triwulan I Tahun 2025

No.	Bulan	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB		
1.	Januari	434.647.394.819,74	240.068.406.666.667,00	0,181	1,25
2.	Februari	832.738.532.093,38	360.102.610.000.000,00	0,231	
3.	Maret	1.328.994.487.798,91	170.808.447.800.000,00	0,159	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Realisasi capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Triwulan I tahun 2026 sebesar 0,159 %

Capaian terhadap target tahun 2026 = $\frac{0,159}{1,25} \times 100 \% = 12,72 \%$.



Gambar 3.10
Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PDRB Triwulan I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

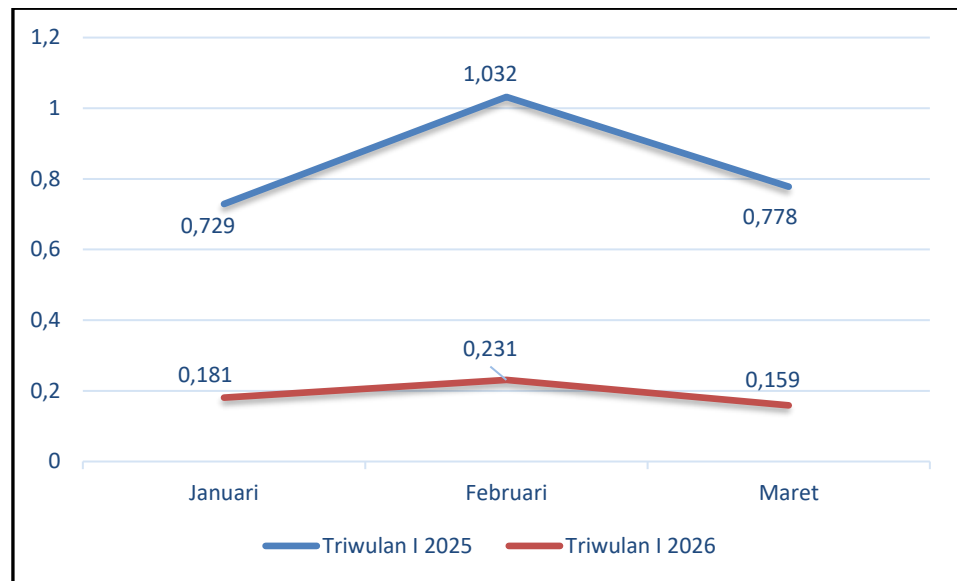
Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2026, sebesar 0,159 atau mencapai 12,72 %. Secara total pajak daerah provinsi mengalami penurunan sementara pajak daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada porsi yang lebih besar bagi hasil ke kabupaten/kota melalui Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sebesar 66 % dari pokok pajak PKB dan BBN-KB.

- 3.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
- Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB selama sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan I Tahun 2026 Dengan Triwulan I Tahun 2025

Periodesasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	0,729	1,032	0,778
Triwulan I 2026	0,181	0,231	0,159

Realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tertinggi terjadi pada Bulan Februari tahun 2026 sebesar Rasio 0,231 dan terendah terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 Rasio 0,159.



Gambar 3.11

Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan

nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), dan hal ini pun berpengaruh ke penerimaan PDRB.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

- 3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
- Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 TW I Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,159	1,27	12,52

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 12,52 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar

pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.42

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Realisasi Triwulan I Tahun 2026		Persentase (%)
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	1.839.265.625.935,00	1.236.193.570.000.000,00	0,149
3.	Sumatera Barat	656.622.129.882,00	352.189.400.000.000,00	0,186
4.	Riau	1.002.354.861.796,30	1.201.383.760.000.000,00	0,083
5.	Jambi	736.257.671.976,18	349.662.600.000.000,00	0,221
6.	Sumatera Selatan	1.146.918.259.448,28	720.205.220.000.000,00	0,159
7.	Bengkulu	102.173.832.501,19	111.829.420.000.000,00	0,091
8.	Lampung	358.966.158.572,73	523.846.540.000.000,00	0,069
9.	Kepulauan Riau	725.859.899.465,28	381.729.880.000.000,00	0,190
10.	Kepulauan Bangka Belitung	245.468.536.713,45	116.811.750.000.000,00	0,210

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada Triwulan I tahun 2026 tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar 0,221 % dan terendah pada Provinsi Lampung sebesar 0,069 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,159 %.

Struktur dan pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa di pasar produk untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sangat tinggi sehingga kontribusi pajak daerah menjadi kecil, apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SK :	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	
IK :	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1,146,918,259,448.28	Rp 720,205,220,000,000.00	0.159
2	Triwulan II	Rp -	Rp -	0.000
3	Triwulan III	Rp -	Rp -	0.000
4	Triwulan IV	Rp -	Rp -	0.000

$$IKSS = \frac{PDRB}{PDRB + Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Dimana:
Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp	248.222.420.212,74	Rp	496.038.092.188,38	Rp	726.267.795.360,75						
Kab. Lahat	Rp	-	Rp	-	Rp	-						
Kab. Muarabanyu	Rp	14.228.083.136,00	Rp	34.339.817.507,00	Rp	43.387.833.788,00						
Kab. Muarawaja	Rp	9.211.387.488,00	Rp	13.190.792.529,00	Rp	14.174.589.281,00						
Kab. Musirawas	Rp	27.837.646.151,00	Rp	27.837.646.151,00	Rp	28.773.539.932,00						
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp	8.811.111.426,00	Rp	16.993.991.899,00	Rp	16.993.991.899,00						
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp	-	Rp	-	Rp	-						
Kota Palembang	Rp	76.331.784.600,00	Rp	156.428.689.258,00	Rp	214.560.103.993,00						
Kota Prabumulih	Rp	5.229.785.509,00	Rp	10.406.588.371,00	Rp	11.053.109.956,00						
Kota Pagar Alam	Rp	1.293.618.360,00	Rp	2.545.116.927,00	Rp	2.545.116.927,00						
Kota Lubuk Linggau	Rp	6.218.113.680,00	Rp	11.997.112.549,00	Rp	11.997.112.549,00						
Kab. Banyuwangi	Rp	17.339.186.422,00	Rp	24.319.287.839,00	Rp	28.113.164.160,00						
Kab. Ogan Ilir	Rp	5.395.734.632,00	Rp	10.665.582.161,00	Rp	11.813.621.520,00						
Kab. OKU Timur	Rp	5.758.763.851,00	Rp	11.973.853.851,00	Rp	14.635.711.594,00						
Kab. OKU Selatan	Rp	1.059.801.559,00	Rp	2.105.647.861,00	Rp	3.172.109.767,00						
Kab. Empat Lawang	Rp	931.323.144,00	Rp	1.910.280.070,00	Rp	1.910.280.070,00						
Kab. Penuk Abab Lematang Ilir	Rp	2.700.217.352,00	Rp	5.629.587.513,00	Rp	8.163.780.232,56						
Kab. Muarawaja Utara	Rp	2.678.489.222,00	Rp	5.356.418.419,00	Rp	5.356.418.419,00						
TOTAL PAJAK DAERAH	Rp	616.647.994.819,74	Rp	810.738.510.093,38	Rp	1.146.918.259.448,28	Rp	-	Rp	-	Rp	-
PDRB Bruto	Rp	240.948.496.666.667,00	Rp	360.102.010.000.000,00	Rp	720.205.220.000.000,00	Rp	810.430.144.910.000,00	Rp	900.635.048.020.000,00	Rp	962.430.468.020.000,00
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB		0,181	0,231	0,159	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.d	:	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
IKSS	:	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1,328,994,487,798.91	Rp 170,808,447,800,000.00	0.778
2	Triwulan II	Rp 3,626,094,936,395.24	Rp 351,258,295,820,000.00	1.032
3	Triwulan III	Rp 4,980,079,723,928.71	Rp 536,561,950,000,000.00	0.928
4	Triwulan IV	Rp 6,559,367,964,577.74	Rp 536,561,950,000,000.00	0.909

$$IKSS: 4 = \frac{\sum_{i=1}^4 \text{Pajak Daerah Provinsi} + \text{Pajak Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Dimana:
Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp 221,932,930,205.38	Rp 457,750,920,553.67	Rp 708,527,218,847.12	Rp 1,215,326,736,529.10	Rp 1,794,405,164,629.50	Rp 1,751,922,085,177.00	Rp 2,178,814,944,748.80	Rp 2,445,014,404,738.70	Rp 2,727,105,112,589.80	Rp 3,172,365,255,262.40	Rp 3,294,568,134,076.40	Rp 3,927,846,336,223.83
Kab. Lahat	Rp 6,112,518,810.00	Rp 13,170,142,736.00	Rp 20,208,116,795.00	Rp 34,995,321,163.00	Rp 26,147,242,031.00	Rp 53,482,422,940.00	Rp 62,639,868,228.00	Rp 69,964,578,754.00	Rp 79,246,832,251.00	Rp 84,010,609,665.00	Rp 89,964,878,355.00	Rp 89,964,878,355.00
Kab. Musi Banyuasin	Rp 10,312,666,991.00	Rp 33,094,748,950.00	Rp 47,174,419,409.00	Rp 58,478,728,005.35	Rp 30,645,522,723.00	Rp 90,661,650,331.35	Rp 107,794,686,913.35	Rp 124,357,203,334.35	Rp 152,158,419,663.35	Rp 152,158,419,663.35	Rp 167,199,758,635.35	Rp 167,199,758,635.35
Kab. Musi Rawas	Rp 4,003,994,925.00	Rp 7,286,554,906.00	Rp 10,569,440,324.00	Rp 14,395,846,059.00	Rp 12,278,732,135.00	Rp 37,673,366,355.00	Rp 41,617,029,877.00	Rp 45,477,972,336.00	Rp 51,210,630,012.00	Rp 56,125,308,569.00	Rp 62,554,387,131.00	Rp 68,680,809,526.00
Kab. Muara Enim	Rp 23,385,515,723.00	Rp 57,279,078,011.00	Rp 71,187,149,635.00	Rp 82,941,125,824.00	Rp 38,551,902,721.00	Rp 77,428,404,525.54	Rp 127,011,502,539.08	Rp 142,221,512,738.58	Rp 161,145,999,093.08	Rp 177,116,698,295.08	Rp 182,695,813,682.08	Rp 182,695,813,682.08
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 6,627,794,681.00	Rp 13,315,914,259.00	Rp 20,401,564,709.00	Rp 26,746,027,519.00	Rp 26,028,235,209.00	Rp 42,753,276,477.00	Rp 51,777,944,745.00	Rp 75,690,052,360.00	Rp 108,989,368,211.00	Rp 118,666,429,972.00	Rp 118,666,429,972.00	Rp 118,666,429,972.00
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 6,446,632,639.00	Rp 13,266,925,930.00	Rp 20,259,704,214.00	Rp 26,070,197,583.00	Rp 23,580,107,340.00	Rp 20,326,023,010.60	Rp 45,948,322,188.00	Rp 46,834,252,600.00	Rp 46,834,252,600.00	Rp 46,834,252,600.00	Rp 46,834,252,600.00	Rp 46,834,252,600.00
Kota Palembang	Rp 92,726,032,033.00	Rp 191,145,895,531.00	Rp 288,159,270,193.00	Rp 373,903,700,731.00	Rp 385,550,200,015.00	Rp 634,818,682,034.00	Rp 780,080,571,592.00	Rp 931,109,823,392.00	Rp 1,131,509,162,722.00	Rp 1,247,713,120,947.00	Rp 1,344,165,663,919.00	Rp 1,344,165,663,919.00
Kota Prabumulih	Rp 4,897,600,371.00	Rp 11,022,324,412.00	Rp 15,609,620,103.00	Rp 20,133,709,149.00	Rp 15,602,091,487.00	Rp 31,504,217,611.00	Rp 39,439,213,548.00	Rp 45,879,176,754.00	Rp 52,718,413,490.00	Rp 58,463,386,407.00	Rp 64,411,983,071.00	Rp 64,411,983,071.00
Kota Pagar Alam	Rp 1,381,543,514.00	Rp 2,560,309,686.00	Rp 3,825,571,517.00	Rp 5,029,241,369.00	Rp 3,504,260,470.00	Rp 634,818,682,034.00	Rp 7,810,634,476.00	Rp 9,643,767,518.00	Rp 11,891,819,497.00	Rp 13,975,870,036.00	Rp 15,838,553,506.00	Rp 15,838,553,506.00
Kota Lubuk Linggau	Rp 5,170,599,627.00	Rp 11,114,115,096.00	Rp 16,354,987,414.00	Rp 20,975,131,731.00	Rp 19,750,762,340.00	Rp 33,794,909,695.00	Rp 41,912,201,967.00	Rp 49,641,870,489.00	Rp 57,497,608,350.00	Rp 64,563,287,087.00	Rp 71,518,101,656.00	Rp 71,518,101,656.00
Kab. Banyuasin	Rp 14,500,585,260.00	Rp 31,672,570,187.00	Rp 51,347,356,274.00	Rp 66,362,403,259.00	Rp 72,795,539,981.00	Rp 113,582,079,036.00	Rp 169,971,911,083.00	Rp 204,742,861,267.00	Rp 225,725,027,516.00	Rp 244,644,569,773.00	Rp 258,642,227,752.00	Rp 258,642,227,752.00
Kab. Ogan Ilir	Rp 5,694,862,408.80	Rp 10,888,601,814.90	Rp 16,094,729,739.84	Rp 20,086,756,350.84	Rp 19,084,688,054.00	Rp 30,760,096,484.80	Rp 37,143,758,801.53	Rp 42,763,731,216.53	Rp 49,635,902,520.53	Rp 62,967,072,415.53	Rp 62,967,072,415.53	Rp 62,967,072,415.53
Kab. OKU Timur	Rp 5,479,906,054.00	Rp 11,417,959,274.95	Rp 16,959,092,202.95	Rp 21,702,417,411.95	Rp 15,595,161,350.00	Rp 33,159,180,149.95	Rp 46,592,231,539.95	Rp 53,950,100,796.95	Rp 63,029,502,480.95	Rp 63,660,144,761.95	Rp 66,387,158,589.95	Rp 66,387,158,589.95
Kab. OKU Selatan	Rp 1,929,150,093.00	Rp 3,883,182,467.00	Rp 4,714,196,594.00	Rp 4,882,012,288.00	Rp 5,524,141,726.00	Rp 8,790,074,536.00	Rp 9,881,547,113.00	Rp 10,959,536,203.00	Rp 12,176,421,568.00	Rp 13,415,491,323.00	Rp 14,855,029,704.00	Rp 14,855,029,704.00
Kab. Empat Lawang	Rp 971,076,121.00	Rp 1,971,294,770.00	Rp 2,890,969,387.00	Rp 3,672,827,922.00	Rp 3,424,904,602.00	Rp 6,196,966,930.00	Rp 7,849,959,396.00	Rp 9,661,764,658.00	Rp 11,487,165,394.00	Rp 13,404,592,466.00	Rp 13,404,592,466.00	Rp 13,404,592,466.00
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1,937,133,251.00	Rp 4,420,246,152.00	Rp 6,931,024,611.00	Rp 8,660,043,903.00	Rp 5,065,949,770.00	Rp 10,938,752,930.00	Rp 11,095,214,907.00	Rp 11,095,214,907.00	Rp 11,095,214,907.00	Rp 11,095,214,907.00	Rp 12,912,915,464.00	Rp 12,912,915,464.00
Kab. Musi Rawas Utara	Rp 1,806,738,465.00	Rp 5,719,996,783.00	Rp 7,780,055,830.00	Rp 9,535,885,111.00	Rp 5,025,719,437.00	Rp 13,484,066,174.00	Rp 16,774,932,658.00	Rp 19,190,910,024.00	Rp 26,622,871,063.00	Rp 29,203,765,516.00	Rp 32,240,831,629.00	Rp 32,240,831,629.00
TOTAL PAJAK DAERAH	Rp 415,317,380,972.18	Rp 880,980,781,519.52	Rp 1,328,994,487,798.91	Rp 2,013,898,111,908.24	Rp 2,502,560,326,082.50	Rp 3,626,094,936,395.24	Rp 3,783,656,476,320.71	Rp 4,338,198,733,887.11	Rp 4,980,079,723,928.71	Rp 5,630,383,449,666.31	Rp 5,919,827,784,624.31	Rp 6,559,367,964,577.74
PDRB Bruto	Rp 56,936,149,266,666.70	Rp 85,404,223,900,000.00	Rp 170,808,447,800,000.00	Rp 230,958,397,140,000.00	Rp 261,033,371,810,000.00	Rp 351,258,295,820,000.00	Rp 413,023,695,820,000.00	Rp 443,906,395,820,000.00	Rp 536,554,495,820,000.00	Rp 598,319,895,820,000.00	Rp 629,202,595,820,000.00	Rp 721,850,695,820,000.00
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0.729	1.032	0.778	0.872	0.959	1.032	0.916	0.977	0.928	0.941	0.941	0.909

3.1.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.43
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,31	0,159	51,29	Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah	Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah
						Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah	Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investasi daerah
						Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah
						Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya
						Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah	Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk mengendalikan kebocoran penerimaan pajak daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
2. Melaksanakan door to door service, penagihan pajak daerah dari satuan rumah tangga yang berkerjasama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak bersama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Melaksanakan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan internal sektor pajak daerah;
6. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,31	0,159	51,29	2.106.800.000	17.359.600	0,82	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.45
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,31	0,159	51,29	2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.46
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	-
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	
	JUMLAH						2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.45
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	51,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	12,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.6 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5

Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

".....Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah....."

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang dikelompokkan pada Pendapatan Asli Daerah.

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori dana transfer ke daerah. Mandatori dana transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain

dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

IKSS.5

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Formula Perhitungan IKSS.5:

$$\left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \right)$$

Dimana:

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah = Realisasi Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.5 tahun 2025:

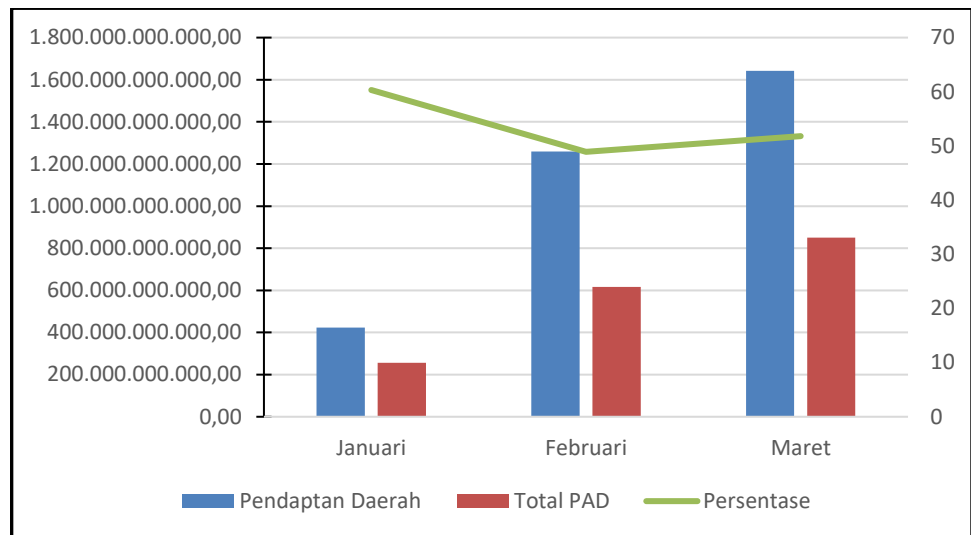
Tabel 3.48

Pengukuran Data Kinerja IKSS 5 Triwulan I Tahun 2026

No.	Bulan	Realisas TW I 2026		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Januari	424.031.881.720,69	255.787.714.620,69	60,323	49,89
2.	Februari	1.258.765.484.321,08	615.693.471.321,08	48,912	
3.	Maret	1.641.969.352.535,81	850.245.439.419,81	51,782	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama Triwulan I tahun 2026 secara *month-to-month* sudah cukup baik, hal ini dibuktikan nilai realisasi kontribusi PAD mencapai 50 %, kinerja tertinggi terjadi pada bulan Januari 2026, dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 60,323 %.



Gambar 3.12
Grafik Persentase PAD Pendapatan Daerah dalam APBD 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 = $\frac{51,782}{49,89} \times 100 \% = 103,79 \%$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 850.245.439.419,81 atau memberikan kontribusi sebesar 103,79 % dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.641.352.535,81 atau sebesar 51,782 %, hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan sangat membutuhkan alternatif pembiayaan lainnya (*creative financing*) antara lain Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat, investasi langsung, CSR.

3.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I Tahun 2025

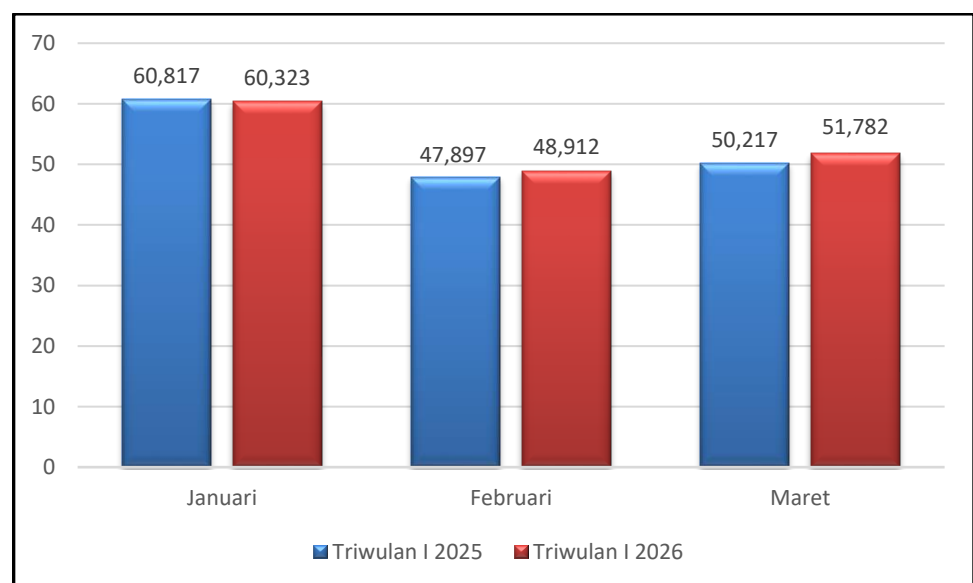
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2026 ke Triwulan I tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Periodesasi	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	60,817	47,897	50,217
Triwulan I 2026	60,323	48,912	51,782

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kontribusi PAD terbesar terhadap Pendapatan Daerah terjadi pada Bulan Januari tahun 2026 dengan memberikan kontribusi sebesar 60,323 %, namun kondisi ini mengalami penurunan pada Bulan Maret tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 51,782 %, mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana APBD, Provinsi Sumatera Selatan masih mengharapkan sumber pembiayaan lainnya non APBD antara lain transfer ke daerah, investasi, CSR, KPBU dan *creative financing* lainnya.



Gambar 3.13

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah TW I 2025 dengan TW I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

- 3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
- Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.50

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	2026	850.245.439.419,81	1.641.969.352.535,81	51,782
dst				
2.	2030	7.075.931.702.943,23	13.549.281.593.204,80	55,64

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 = $\frac{51,782}{55,64} \times 100 \% = 93,067 \%$

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 TW I dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,782	55,64	93,066

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Renstra tahun 2025 – 2029 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 93,066 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tahun 2026 sesuai dengan *on the track* dari dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 51,782 %, masih harus ditopang oleh sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan I 2026		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	947.561.154.280,96	2.915.102.272.375,00	32,505
3.	Sumatera Barat	573.784.489.974,76	1.487.323.169.015,80	38,578
4.	Riau	594.262.451.998,11	870.017.014.172,11	68,305
5.	Jambi	294.590.977.412,47	491.467.392.412,47	59,941
6.	Sumatera Selatan	850.245.439.419,81	1.641.969.352.535,81	51,782
7.	Bengkulu	28.627.960.497,00	112.625.049.497,00	25,419
8.	Lampung	45.357.874.118,98	45.452.964.118,98	99,791
9.	Kepulauan Riau	313.218.238.514,00	490.924.699.514,00	63,802
10.	Kepulauan Bangka Belitung	151150598682.53	367.844.906.782,53	41,091

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2025

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada Provinsi Lampung sebesar 99,791 % sementara kontribusi terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 25,419 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 51,782 %. Namun kondisi kontribusi PAD Sumatera Selatan diatas 50 % yang mengindikasikan bahwa masih mempunyai ketergantungan pada transfer ke daerah.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.5	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
IKSS	:	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,699,323,823,000.00	47.110
2	Triwulan II	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 4,338,860,285,073.79	51.693
3	Triwulan III	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 6,543,538,055,895.93	48.927
4	Triwulan IV	Rp 4,509,197,075,145.67	Rp 9,837,929,951,702.67	45.835

$$\left(\frac{[Pendapatan Asli Daerah]}{Pendapatan Daerah} \times 100 \% \right)$$

Dimana :
PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Daerah : Realisasi pendapatan daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 240,196,687,137.67	Rp 496,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,796,709.94	Rp 2,920,093,633,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,730,677,293,545.70	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	PENDAPATAN DAERAH	Rp 610,363,668,637.67	Rp 1,351,055,896,145.99	Rp 1,699,323,823,000.00	Rp 3,082,180,160,422.22	Rp 3,736,168,857,076.74	Rp 4,338,860,285,073.79	Rp 5,383,297,239,495.94	Rp 6,498,375,238,175.03	Rp 6,543,538,055,895.93	Rp 8,252,134,352,268.70	Rp 9,007,267,189,992.25	Rp 9,837,929,951,702.67
% PAD terhadap Pendapatan Daerah		39.353	36.779	47.110	47.267	46.576	51.693	48.607	44.936	48.927	45.209	44.533	45.835

3.1.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,51	51,782	415,25	Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive	

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
5. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
7. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.54
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi TW I	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,51	51,782	415,25	144.000.000	3.750.000	2,60	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.55
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,51	51,782	415,25	144.000.000,00	3.750.000,00	2,60	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.6.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.56
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		94,15	86,71	91,79	144.000.000,00	3.750.000,00	2,60	-
	1.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	94,15	86,71	91,79	144.000.000,00	3.750.000,00	2,60	-
		1.1 Pengolahan Data Retribusi Daerah				144.000.000,00	3.750.000,00	2,60	
	JUMLAH					144.000.000,00	3.750.000,00	2,60	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.6.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	415,25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,82	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	7,76	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.7 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6

Meningkatnya Pendapatan Daerah

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat"

Pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai tahun 2001-2020 telah memberikan gambaran perekonomian daerah serta memberikan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya. Keleluasaan dalam kewenangan pemerintahan daerah untuk menggali sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah terutama yang bersumber pada pendapatan pajak daerah, penerimaan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah, dimana dalam perekonomian pajak memiliki peranan sebagai sumber penerimaan daerah dan juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal daerah melalui pengurangan tarif pajak sehingga merangsang pertumbuhan investasi daerah.

Formula Perhitungan IKSS.6:

$$y = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100 \%$$

Dimana:

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

Realisasi PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

Target PAD = Target PAD Tahun ke n yang ditetapkan dalam APBD

3.1.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran data kinerja IKSS.6 Triwulan I tahun 2026:

Tabel 3.58
Pengukuran Data Kinerja IKSS 6 Triwulan I Tahun 2026

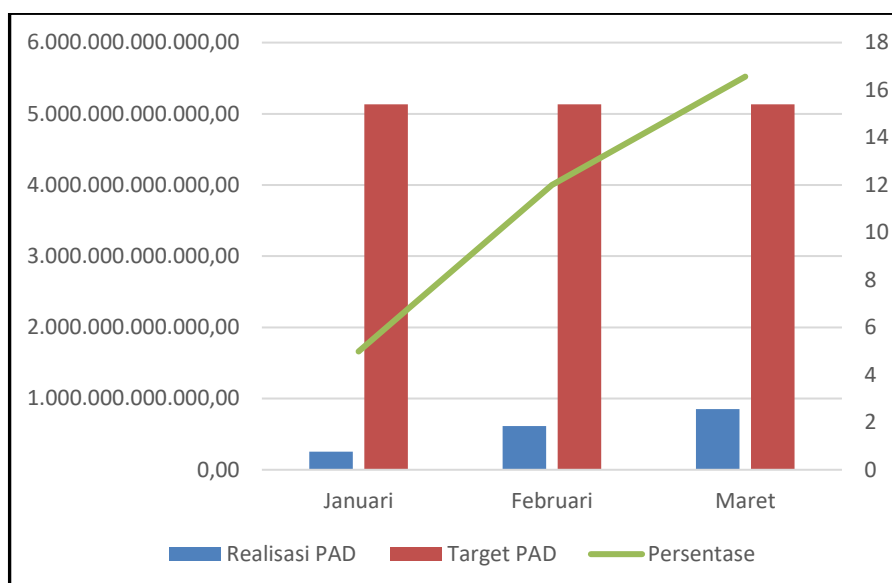
No.	Bulan	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Realisasi	Target		
1.	Januari	255.787.714.620,69	5.132.383.464.643,00	4,984	92,21
2.	Februari	615.693.471.321,08	5.132.383.464.643,00	11,996	
3.	Maret	850.245.439.419,81	5.132.383.464.643,00	16,566	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi pengukuran data kinerja pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 secara month-to-month mengalami kenaikan.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{16,566}{92,21} \times 100 \% = 17,965 \%$$

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Triwulan I tahun 2026 mencapai nilai Rp. 850.245.439.419,81 atau terealisasi sebesar 16,566 % dari rencana target sebesar Rp. 5.132.383.464.643,00 hal ini mengindikasikan bahwa kinerja masih harus ditingkatkan lagi dengan realisasi uang masih dibawah 20 persen dengan menggali sumber potensi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan karakteristik daerah.



Gambar 3.14
Grafik Realisasi Pencapaian PAD Terhadap target APBD TW I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target Triwulan I tahun 2026 ke Triwulan I tahun 2025

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Periodesasi	Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Target		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	5,386	11,143	17,952
Triwulan I 2026	4,984	11,996	16,566

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi capaian kinerja pencapaian PAD terhadap target Bulan Maret tahun 2026 mencapai 16,566 %. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 sebesar 16,566 %, namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Bulan Maret 2025 mencapai 17,952 %.

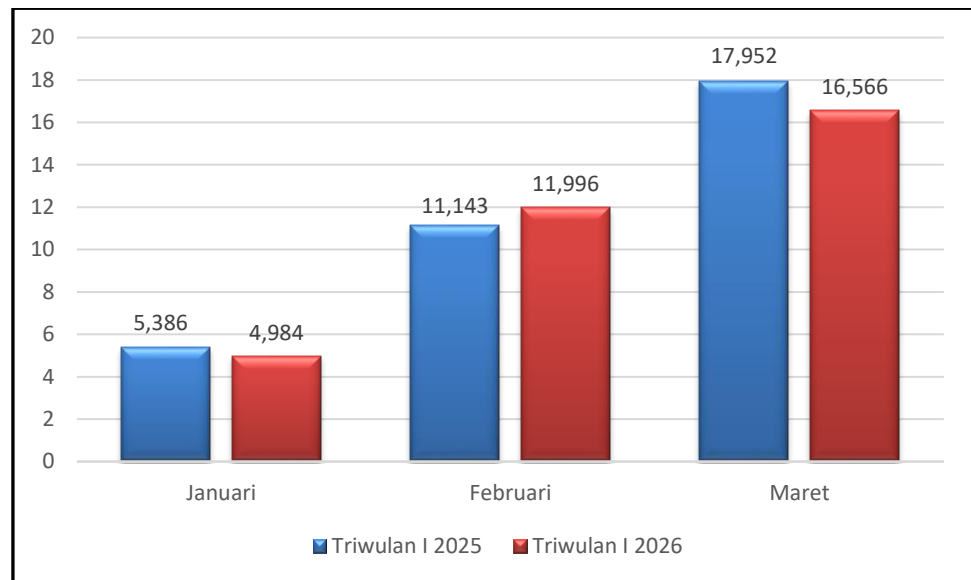
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.6	:	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
IKSS	:	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Uraian	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800,547,217,519.50	Rp 4,459,311,556,974.00	17.952
2	Triwulan II	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 4,642,152,890,474.00	48.316
3	Triwulan III	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 4,838,287,154,591.00	66.172
4	Triwulan IV	Rp 4,509,197,075,145.67	Rp 4,838,287,154,591.00	93.198

$$y = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100\%$$

Dimana :
y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD
RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n
Target Tahun = Target Pendapatan Tahun ke n

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240,196,687,137.67	Rp 496,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,796,709.94	Rp 2,920,093,633,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,730,677,293,545.70	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	Target PAD	Rp 4,459,311,556,974.42	Rp 4,459,311,556,974.42	Rp 4,459,311,556,974.00	Rp 4,459,311,556,974.42	Rp 4,642,152,890,474.00	Rp 4,642,152,890,474.00	Rp 4,642,152,890,474.00	Rp 4,642,152,890,474.00	Rp 4,838,287,154,591.00	Rp 4,838,287,154,591.00	Rp 4,838,287,154,591.00	Rp 4,838,287,154,591.00
% Realisasi PAD terhadap Target PAD		5.386	11.143	17.952	32.670	37.486	48.316	56.367	62.904	66.172	77.107	82.905	93.198



Gambar 3.15

Grafik Perbandingan Kinerja Pencapaian PAD TW I Tahun 2026 Terhadap dengan TW I Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pencapaian PAD Triwulan I tahun 2026 dengan rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.60

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Triwulan I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	2026	850.245.439.419,81	5.132.383.464.643,00	16,566
	dst			
2.	2030			N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD dalam RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.61

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,566	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025 apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah Triwulan I 2026		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	947.561.154.280,96	6.967.065.771.493,00	13,601
3.	Sumatera Barat	573.784.489.974,76	3.512.798.562.828,00	16,334
4.	Riau	594.262.451.998,11	5.240.334.064.481,00	11,340
5.	Jambi	294.590.977.412,47	1.945.387.781.796,00	15,143

6.	Sumatera Selatan	850.245.439.419,81	5.132.383.464.643,00	16,566
7.	Bengkulu	28.627.960.497,00	1.254.994.442.537,00	2,281
8.	Lampung	45.357.874.118,98	4.025.032.820.130,00	1,127
9.	Kepulauan Riau	313.218.238.514,00	1.844.251.902.410,00	16,983
10.	Kepulauan Bangka Belitung	151.150.598.682,53	833.309.933.245,62	18,139

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target pada Triwulan I tahun 2026 tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 18,139 % dan terendah pada Provinsi Lampung sebesar 1,127 %. Posisi Provinsi Sumatera Selatan berada pada urutan ke tiga sebesar 16,566 % setelah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.63

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 6

O.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10,00	16,566	165,66	Melakukan update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat	
						Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah	
						Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya	
						Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu	
						<i>Cascading</i> pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD, antara lain:

1. Melaksanakan program intensifikasi pajak daerah, dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan penambahan objek pajak baru melalui kerjasama investasi daerah dengan Perangkat Daerah DMPTSP;
3. Meningkatkan deversifikasi pajak daerah dengan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
7. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.64
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Anggaran	Realisasi TW I	%	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10,00	16,566	165,66	102.000.000	0,00	0,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.65

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW I Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	10,00	16,566	165,66	102.000.000,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.7.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.66
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW I Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		94,15	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	-
	1.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	94,15	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	-
		1.1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				102.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH					102.000.000,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.7.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165,66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	12,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB

".....Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah"

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah suatu produk pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik daerah timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi lapangan usaha, PDRB merupakan akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai tambah bruto yang mampu dihasilkan oleh setiap lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Formula Perhitungan IKSS.7:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\ %$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = Realisasi PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

3.1.8.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.7 tahun 2025:

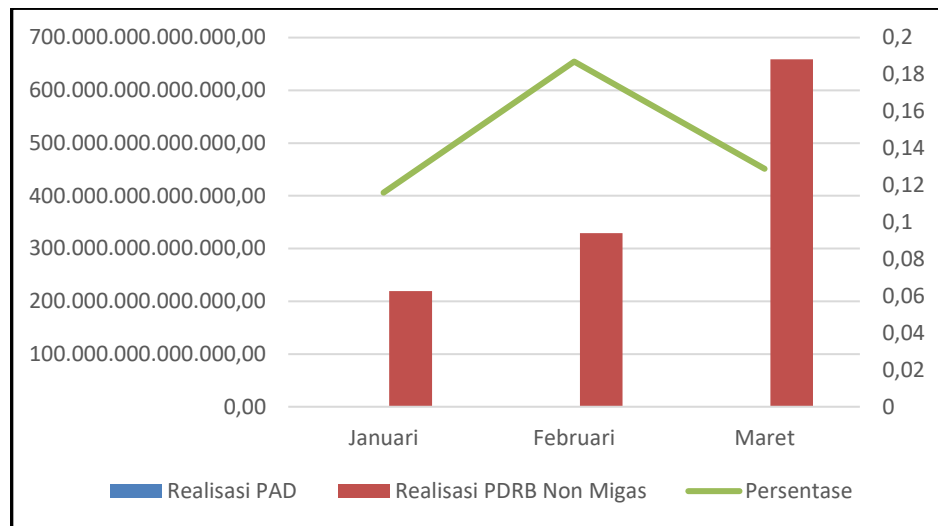
Tabel 3.67
Pengukuran Data Kinerja IKSS 7 TW I Tahun 2026

No.	Bulan	Uraian		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB Non Migas		
1.	Januari	255.787.714.620,69	219.617.553.333.333,00	0,116	0,98
2.	Februari	615.693.471.321,08	329.426.330.000.000,00	0,187	
3.	Maret	850.245.439.419,81	658.852.660.000.000,00	0,129	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Realisasi kinerja IKSS.7 Trwuwulan I tahun 2026 secara *month-to-month* menunjukkan kenaikan yang masih bertahap mengindikasikan kinerja positif kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan realisasi sebesar 0,129%.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{0,129}{0,98} \times 100\ % = 13,163\ %.$$



Gambar 3.16
Grafik Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas Terhadap PAD TW I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB sektor riil mencapai 0,129%, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap PDRB lapangan usaha Triwulan I masih relatif kecil. Sektor riil yang perlu dilakukan stimulus dari insentif pajak daerah yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor *home industry*

3.1.8.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025

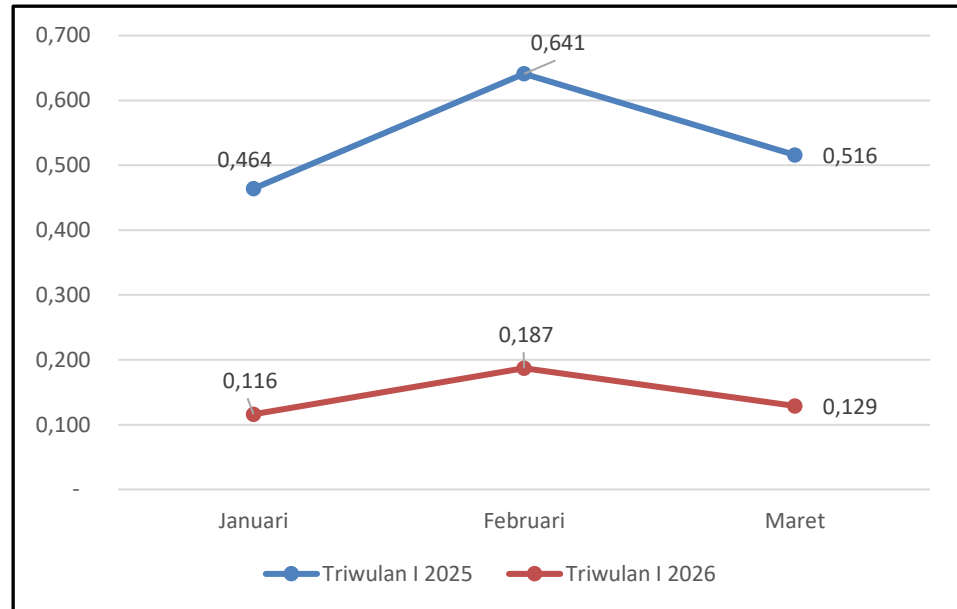
Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas Triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun Triwulan I tahun 2025:

Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	0,464	0,641	0,516
Triwulan I 2026	0,116	0,187	0,129

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas secara *month-to-month* terbesar terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 sebesar 0,129 % dan kontribusi terendah pada Bulan Januari tahun 2026 sebesar 0,116 %.



Gambar 3.17
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas TW I 2026 dengan TW I 2025
 Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel dan BPS Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), hal ini juga mempengaruhi penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	2026	850.245.439.419,81	658.852.660.000.000,00	0,129
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,129	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan I Tahun 2026		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	947.561.154.280,96	1.236.193.570.000.000,00	0,077
3.	Sumatera Barat	573.784.489.974,76	352.189.400.000.000,00	0,163
4.	Riau	594.262.451.998,11	1.201.383.760.000.000,00	0,049
5.	Jambi	294.590.977.412,47	349.662.600.000.000,00	0,084
6.	Sumatera Selatan	850.245.439.419,81	658.852.660.000.000,00	0,129
7.	Bengkulu	28.627.960.497,00	111.829.420.000.000,00	0,026
8.	Lampung	45.357.874.118,98	523.846.540.000.000,00	0,009
9.	Kepulauan Riau	313.218.238.514,00	381.729.880.000.000,00	0,082
10.	Kepulauan Bangka Belitung	151.150.598.682,53	116.811.750.000.000,00	0,129

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terbesar pada Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 0,163 %, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 0,009 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,129 %.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

5	Meningkatnya kontribusi PAD Terhadap PORB
6	Persentase Rasio PAD Terhadap PORB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PORB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PORB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Terdapat 1	Rp. 850.245.439.419,81	Rp. 658.852.660.000.000	0,129
2	Terdapat 2			#DIV/0!
3	Terdapat 3			#DIV/0!
4	Terdapat 4			#DIV/0!

$$Rasio = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PORB Non Migas}} \times 100\%$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PORB = PORB Non Migas

No.	URAIAN	TAHUN 2020											
		Terdapat 1			Terdapat 2			Terdapat 3			Terdapat 4		
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp. 255.787.714.620,69	Rp. 615.693.471.321,08	Rp. 850.245.439.419,81			Rp. -			Rp. -			Rp. -
2	Realisasi PORB Non Migas	Rp. 219.617.553.333,333,00	Rp. 329.436.330.000.000,00	Rp. 658.852.660.000.000,00	Rp. 711.944.420.000.000,00	Rp. 741.480.300.000.000,00	Rp. 824.127.940.000.000,00	Rp. 880.902.261.313,333,00	Rp. 909.289.425.000.000,00	Rp. 994.450.910.000.000,00	Rp. 1.051.225.233.333,333,00	Rp. 1.079.612.395.000.000,00	Rp. 1.164.779.880.000.000,00
% Rasio PAD terhadap PORB Non Migas		0,116	0,187	0,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS	:	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800,547,217,519.50	Rp 155,153,400,000,000	0.516
2	Triwulan II	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 320,428,680,000,000	0.700
3	Triwulan III	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 490,751,650,000,000	0.652
4	Triwulan IV	Rp 4,509,197,075,145.67	Rp 490,751,650,000,000	0.919

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\%$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB = PDRB Non Migas

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240,196,687,137.67	Rp 496,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,796,709.94	Rp 2,920,093,533,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,730,677,293,545.70	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	Realisasi PDRB Non Migas	Rp 51,717,800,000,000.00	Rp 77,576,700,000,000.00	Rp 155,153,400,000,000.00	Rp 210,245,160,000,000.00	Rp 237,791,040,000,000.00	Rp 320,428,680,000,000.00	Rp 377,203,003,333,333.00	Rp 405,590,165,000,000.00	Rp 490,751,650,000,000.00	Rp 547,525,973,333,333.00	Rp 575,913,135,000,000.00	Rp 661,074,620,000,000.00
% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas		0.464	0.641	0.516	0.693	0.732	0.700	0.694	0.720	0.652	0.681	0.696	0.682

3.1.8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.73
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,2	0,129	64,50	Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru	Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal daerah
						Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan	Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke wilayah pedesaan
						Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal	Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
						Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara massif dan berkala waktu
						Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari KPK	Pendampingan tim korusupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Lapangan Usaha Non Migas, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,2	0,129	64,50	548.800.000	26.718.300	4,87	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

3.1.8.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.75

Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,2	0,129	64,50	548.800.000,00	26.718.300,00	4,87	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.76
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 TW I Tahun 2026 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	1,83	1,94	548.800.000,00	26.718.300,00	4,87	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	1,83	1,94	548.800.000,00	26.718.300,00	4,87	-
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				548.800.000,00	26.718.300,00	4,87	
	JUMLAH						548.800.000,00	26.718.300,00	4,87	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.1.8 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.77

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 7 TW I Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	64,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7,76	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,	22,02	Menunjang

				Pajak Daerah	dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Formula Perhitungan IKSS.8:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pola opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan menjadi sumber kekuatan pajak daerah yang berdasarkan basis data pajak daerah berdasarkan domisili penduduk. Penguatan basis data pajak daerah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.8.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran data kinerja IKSS.8 Triwulan I tahun 2026:

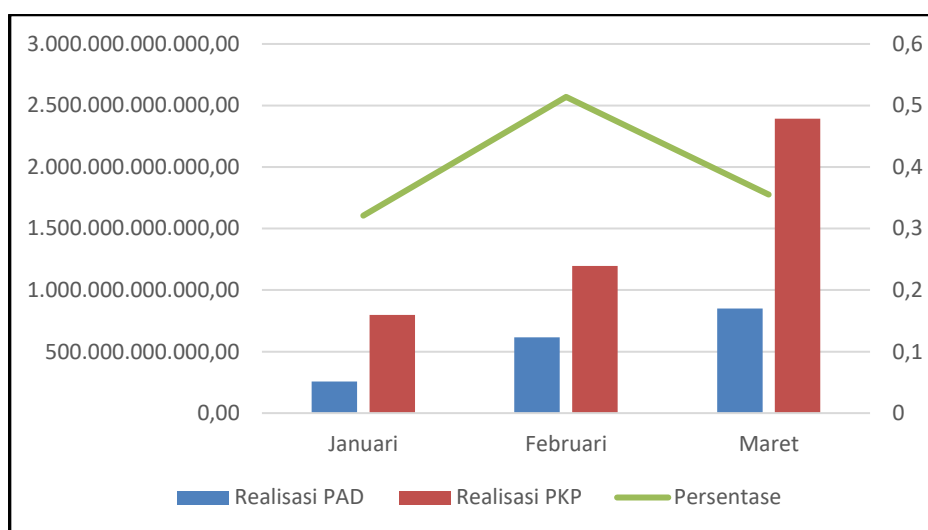
Tabel 3.78
Pengukuran Data Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026

No.	Bulan	Uraian		Rasio	Target Tahunan 2026
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB PKPD		
1.	Januari	255.787.714.620,69	797.887.592.592,59	0,321	1,18
2.	Februari	615.693.471.321,08	1.196.831.388.888,89	0,514	
3.	Maret	850.245.439.419,81	2.393.662.777.777,78	0,355	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah secara *month-to-month* tahun 2026 tertinggi terjadi pada Bulan Februari 2026 sebesar 0,514 % dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026 sebesar 0,321 %.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{0,355}{1,18} \times 100 \% = 30,085 \%$$



Gambar 3.18
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 0,355 %, hal ini mengindikasikan bahwa tagging pendapatan yang menjadi proxy belanja pengeluaran pemerintah daerah yang selanjutnya dikonsumsi masyarakat dengan membeli produk barang dan jasa masih sangat kecil dengan nilai 0,355 %.

Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembentuk perekonomian daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi proxy pengeluaran belanja pemerintah daerah yang menghasilkan produk barang dan jasa di masyarakat. Selama periode tahun 2010 – 2025, perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif.

3.1.8.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan I Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 :

Tabel 3.79

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2026

Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		
	Januari	Februari	Maret
Triwulan I 2025	1,556	2,146	1,728
Triwulan I 2026	0,321	0,514	0,355

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi terjadi pada Bulan Maret 2026 sebesar 0,355 dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026 sebesar 0,321.

Belanja daerah (government expenditure) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

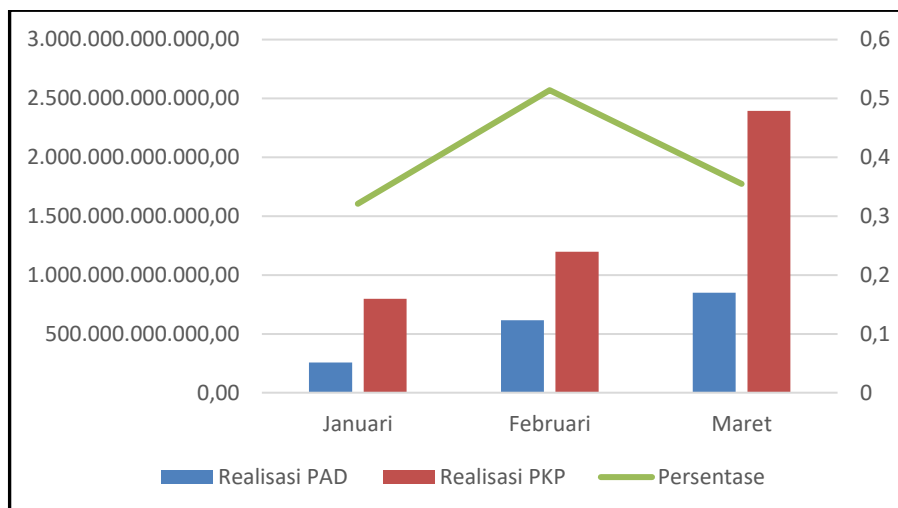
	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	
IKSS	:	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB PKPD	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800,547,217,519.50	Rp 463,177,777,778	1.728
2	Triwulan II	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 1,018,864,444,444	2.201
3	Triwulan III	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 1,584,585,000,000	2.020
4	Triwulan IV	Rp 4,509,197,075,145.67	Rp 1,584,585,000,000	2.846

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240,196,687,137.67	Rp 496,908,944,084.99	Rp 800,547,217,519.50	Rp 1,456,859,523,046.22	Rp 1,740,160,942,225.74	Rp 2,242,892,148,257.79	Rp 2,616,648,796,709.94	Rp 2,920,093,633,483.03	Rp 3,201,572,841,453.93	Rp 3,245,209,347,130.10	Rp 4,011,191,364,200.25	Rp 4,509,197,075,145.67
2	Realisasi PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp 154,392,592,592.59	Rp 231,588,888,888.89	Rp 463,177,777,777.78	Rp 648,406,666,666.67	Rp 741,021,111,111.11	Rp 1,018,864,444,444.44	Rp 1,207,437,962,962.96	Rp 1,301,724,722,222.22	Rp 1,584,585,000,000.00	Rp 1,773,158,518,518.52	Rp 1,867,445,277,777.78	Rp 2,150,305,555,555.56
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		1.556	2.146	1.728	2.247	2.348	2.201	2.167	2.243	2.020	1.830	2.148	2.097



Gambar 3.19

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKP TW I 2026 dengan TW I Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029

Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun TW I 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW I 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,355	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.81
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	2026	850.245.439.419,81	2.393.662.777.777,78	0,355
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan I Tahun 2026		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	947.561.154.280,96	451.501.212.121,00	2,099
3.	Sumatera Barat	573.784.489.974,76	331.568.947.368,00	1,731
4.	Riau	594.262.451.998,11	683.320.833.333,00	0,870
5.	Jambi	294.590.977.412,47	325.716.363.636,00	0,904

6.	Sumatera Selatan	850.245.439.419,81	2.393.662.777.778,00	0,355
7.	Bengkulu	28.627.960.497,00	416.595.000.000,00	0,069
8.	Lampung	45.357.874.118,98	426.817.333.333,00	0,106
9.	Kepulauan Riau	313.218.238.514,00	452.318.571.429,00	0,692
10.	Kepulauan Bangka Belitung	151.150.598.682,53	273.081.428.571,00	0,554

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,099, terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,069, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,355.

3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.83
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Penempelan stiker tanda lunas di kendaraan bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
						Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan door to door service	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.84
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83	342.700.000	0,00	0,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

3.1.8.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.2.5.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.85

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW I Tahun 2025⁶ Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,12	0,355	295,83	342.700.000,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.1.1.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.86
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW I Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	1,83	1,94	342.700.000,00	0,00	0,00	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	94,15	1,83	1,94	342.700.000,00	0,00	0,00	-
		1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				342.700.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH					342.700.000,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	295,83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	12,44	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	1,82	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7,76	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5,54	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026



Kesimpulan dan Langkah Strategis

4.1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja terhadap beberapa indikator sebagaimana tertuang di dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra tahun 2025-2029, dimana kinerja pada Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

I. Hasil pengukuran indikator tujuan dan sasaran strategis:

1. Indikator indeks kapasitas fiskal daerah mencapai nilai indeks 2,493
2. Indikator deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (*Revenue Mobilization*) mencapai 83,43 % (deviasi semakin baik mendekati garis normal)
3. Indikator indeks kemandirian fiskal daerah mencapai nilai indeks 0,5178
4. Indikator pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD mempunyai kontribusi sebesar 3,375 %
5. Indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB mempunyai kontribusi sebesar 0,159 %
6. Indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah mempunyai kontribusi sebesar 51,782 %
7. Indikator persentase realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai realisasi sebesar 16,566 %
8. Indikator persentase rasio PAD terhadap PDRB Non Migas mempunyai kontribusi sebesar 0,129 %
9. Indikator rasio PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mempunyai kontribusi sebesar Rasio 0,355

4.2. Langkah Strategis

Berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah yang telah dicapai pada Triwulan I tahun 2026, berikut langkah strategis yang bersifat evaluasi perbaikan internal dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja yang perlu ditingkatkan pada Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut :

1. Terhadap hasil pengukuran indikator tujuan dan sasaran strategis:
 - a. Sasaran penguatan kinerja sumber daya manusia (*Human Capital Index*) internal:
 - ❖ Peningkatan atas pemahaman, komitmen dan implementasi terhadap kinerja mulai dari pejabat eselon III sampai ke level staf pelaksana;
 - ❖ Setiap individu pegawai mempunyai tanggungjawab atas produk hasil kinerja untuk berkontribusi baik untuk Perangkat Daerah maupun masyarakat;
 - ❖ Peningkatan kapasitas kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar tematik perpajakan, workshop, *in house training* pada provinsi lain;
 - b. Terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan:
 - ❖ Sinergi dan kolaborasi Bersama dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk optimalisasi pendapatan daerah serta stakeholder lainnya sebagai bentuk *cross cutting* peningkatan kinerja;
 - ❖ Sinergi dan kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan razia bersama, pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - ❖ Melakukan pendataan dan validasi data kendaraan bermotor sebagai wajib pajak bersama dengan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapenda 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui *home interview survey*;
 - ❖ Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) melalui satuan tugas bersama stakeholder terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal serta 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - ❖ Melaksanakan Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - ❖ Meningkatkan tata kelola pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pajak daerah;

- ❖ Pelaksanaan *door to door service*, optimalisasi pendapatan sektor pajak bahan bakar dan operasi gabungan dengan Tim Pembina Samsat Provinsi;
- ❖ Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- ❖ Penguatan basis data pajak daerah;
- ❖ Meningkatkan pengawasan berbasis risiko serta penguatan pengendalian sistem intern pemerintah sektor pajak daerah;
- ❖ Perluasan akses keuangan digital dengan peningkatan pembayaran pajak daerah secara non tunai.

2. Terhadap kinerja anggaran:

- a. Percepatan dalam daya serap anggaran dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode Triwulan II tahun 2026;
- b. Peningkatan dan konsistensi penyerapan anggaran untuk menghasilkan produktivitas yang efisien dalam mendukung kinerja indikator tujuan dan sasaran strategis.

Palembang, 10 April 2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMATERA SELATAN,**



DR. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633, 312421 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137

Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>, Pos-el bapendasumateraselatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gubernur Sumatera Selatan,

Palembang, 21 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	84,07

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 219.574.572.092,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 120.800.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.972.583.920,00	APBD

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Dr. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

		Grafik Rencana
		Grafik Realisasi

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

[illegible]

